

**STATISTIK
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI MALUKU
2019**





**STATISTIK
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI MALUKU
2019**

Halaman ini sengaja dikosongkan.

<https://maluku.bps.go.id>

**STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI MALUKU 2019**

ISSN : 2442-7144

Nomor Publikasi: 81520.18.12

Katalog: 4101002.81

Ukuran Buku: 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman: xix + 164 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Dicetak oleh:

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik.*

Halaman ini sengaja dikosongkan.

<https://maluku.mps.go.id>

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Drs. Dumangar Hutauruk, M.Si.

Penanggung Jawab:

Yusuf Tatar Mangaraksa, SST., M.Stat.

Editor:

Ketut Krisna, SST., M.Si.

Penulis:

Rieko Dita Hermawati, SST

Pengolah Data:

Ketut Krisna, SST., M.Si.
Rieko Dita Hermawati, SST.

<https://maluku.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan.

<https://maluku.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU

KATA PENGANTAR

Dukungan data dan informasi yang memotret kondisi masyarakat secara akurat dan lengkap diperlukan dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Data dan informasi diperlukan oleh para perumus dan pengambil kebijakan agar pembangunan dapat direncanakan, diawasi, dan dievaluasi secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dukungan data dan informasi yang lengkap serta akurat, kebutuhan masyarakat yang perlu dibangun dapat direncanakan dengan baik, demikian pula evaluasi terhadap hasilnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat diketahui sehingga perbaikan dan peningkatan di masa depan dapat dirumuskan.

Statistik Kesejahteraan Rakyat dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik memuat berbagai data statistik yang penting dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Perumahan, dan indikator sosial-ekonomi lainnya. Angka-angka Statistik Kesejahteraan Rakyat dihasilkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan disajikan dalam publikasi ini adalah data yang dikumpulkan pada Maret 2019.

Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi pemerintah, namun juga masyarakat pada umumnya. Masukan dan koreksi dari pengguna data sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Ambon, Desember 2019
Kepala,

DUMANGAR HUTAURUK

Halaman ini sengaja dikosongkan.

<https://malukuhps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Singkatan	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	4
1.3 Sumber Data	4
1.4 Metodologi.....	4
1.5 Sistematika Penyajian	4
II. KEPENDUDUKAN	5
2.1 Konsep dan Definisi.....	7
2.2 Ulasan Singkat	8
III. KESEHATAN.....	37
3.1 Konsep dan Definisi.....	39
3.2 Ulasan Singkat	40
IV. PENDIDIKAN	67
4.1 Konsep dan Definisi.....	69
4.2 Ulasan Singkat	70
V. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	97
5.1 Konsep dan Definisi.....	99
5.2 Ulasan Singkat	100
VI. PERUMAHAN	111
6.1 Konsep dan Definisi.....	113
6.2 Ulasan Singkat	114
VII. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	137
7.1 Konsep dan Definisi.....	139
7.2 Ulasan Singkat	140
VIII. KEADAAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA LAINNYA.....	149
8.1 Konsep dan Definisi.....	151
8.2 Ulasan Singkat	151

Halaman ini sengaja dikosongkan.

<https://malukuhps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019 12
Tabel 2.2	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019..... 13
Tabel 2.3.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019..... 14
Tabel 2.3.B	Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019 15
Tabel 2.3.C	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019 16
Tabel 2.4.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019 17
Tabel 2.4.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019 18
Tabel 2.4.C	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019 19
Tabel 2.5.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019 20
Tabel 2.5.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019 21
Tabel 2.5.C	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019 22
Tabel 2.6 A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15—49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019 23
Tabel 2.6 B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019 24
Tabel 2.6 C	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15—49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019 25
Tabel 2.7.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Maluku, 2019 26
Tabel 2.7.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Maluku, 2019 27
Tabel 2.7.C	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Maluku, 2019 28
Tabel 2.8.A	Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0-4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil di Provinsi Maluku, 2019..... 29
Tabel 2.8.B	Persentase Anak Perempuan Berumur 0-4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil di Provinsi Maluku, 2019..... 30
Tabel 2.8.C	Persentase Anak Berumur 0-4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil di Provinsi Maluku, 2019 31

Tabel 2.9	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Berstatus Kawin yang Pasangannya Biasa Tinggal di Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019.....	32
Tabel 2.10	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019	33
Tabel 2.11	Persentase Penduduk Berumur 17 Tahun ke Atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019	34
Tabel 2.12	Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019	35
Tabel 3.1.A	Persentase Penduduk Laki—Laki Menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019.....	44
Tabel 3.1.B	Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019.....	45
Tabel 3.1.C	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019.....	46
Tabel 3.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dalam 1 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	47
Tabel 3.3	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan dalam 1 Bulan Terakhir (angka Kesakitan) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019.....	48
Tabel 3.4	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019	49
Tabel 3.5.A	Persentase Penduduk Laki—Laki yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2019.....	50
Tabel 3.5.B	Persentase Penduduk Perempuan yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2019.....	51
Tabel 3.5.C	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2019	52
Tabel 3.6.A	Persentase Penduduk Laki—Laki yang Berobat Jalan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019	53
Tabel 3.6.B	Persentase Penduduk Perempuan yang Berobat Jalan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019	54
Tabel 3.6.C	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019.....	55
Tabel 3.7.A	Persentase Penduduk Laki—Laki yang Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utamanya di Provinsi Maluku, 2019	56
Tabel 3.7.B	Persentase Penduduk Perempuan yang Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utamanya di Provinsi Maluku, 2019	57

Tabel 3.7.C	Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utamanya di Provinsi Maluku, 2019.....	58
Tabel 3.8	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Pernah Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2019.....	59
Tabel 3.9.A	Persentase Penduduk Laki—Laki yang Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2019.....	60
Tabel 3.9.B	Persentase Penduduk Perempuan yang Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2019.....	61
Tabel 3.9.C	Persentase Penduduk yang Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2019.....	62
Tabel 3.10.A	Persentase Penduduk Laki—Laki yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Dirawat (hari) di Provinsi Maluku, 2019..	63
Tabel 3.10.B	Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Dirawat (hari) di Provinsi Maluku, 2019..	64
Tabel 3.10.C	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Dirawat (hari) di Provinsi Maluku, 2019	65
Tabel 3.11	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dan Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019	66
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019	72
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019.....	75
Tabel 4.3.A	Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0—6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah di Provinsi Maluku, 2019	76
Tabel 4.3.B	Persentase Anak Perempuan Berumur 0—6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah di Provinsi Maluku, 2019.....	77
Tabel 4.3.C	Persentase Anak Berumur 0—6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah di Provinsi Maluku, 2019.....	78
Tabel 4.4.A	Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0—6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2019.....	79
Tabel 4.4.B	Persentase Anak Perempuan Berumur 0—6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2019.....	80
Tabel 4.4.C	Persentase Anak Berumur 0—6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2019	81
Tabel 4.5.A	Persentase Penduduk Laki—Laki Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019.....	82
Tabel 4.5.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019.....	83
Tabel 4.5.C	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019	84

Tabel 4.6.A	Persentase Penduduk Laki—Laki Berumur 7—24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019.....	85
Tabel 4.6.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7—24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019.....	86
Tabel 4.6.C	Persentase Penduduk Berumur 7—24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019	87
Tabel 4.7.A	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Laki—Laki Berumur 5—18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019.....	88
Tabel 4.7.B	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Perempuan Berumur 5—18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019.....	89
Tabel 4.7.C	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5—18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019 ...	90
Tabel 4.8.A	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Laki-Laki Berumur 7—18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jejang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019	91
Tabel 4.8.B	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Perempuan Berumur 7—18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jejang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019.....	92
Tabel 4.8.C	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7—18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jejang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019	93
Tabel 4.9.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019.....	94
Tabel 4.9.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019.....	95
Tabel 4.9.C	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019.....	96
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Maluku, 2019	105
Tabel 5.2	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan di Provinsi Maluku, 2019.....	106
Tabel 5.3	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran yang Terakhir di Provinsi Maluku, 2019	107
Tabel 5.4	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Berat Badan Bayi di Provinsi Maluku, 2019	108
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi KB di Provinsi Maluku, 2019	109

Tabel 5.6	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Sedang ber KB Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Alat KB Digunakan di Provinsi Maluku, 2019.....	110
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Rumah di Provinsi Maluku, 2019	120
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Maluku, 2019	121
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Tempat Tinggal (M ²) di Provinsi Maluku, 2019.....	122
Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Per Kapita (M ²) di Provinsi Maluku, 2019	123
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap di Provinsi Maluku, 2019	124
Tabel 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding di Provinsi Maluku, 2019	125
Tabel 6.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai di Provinsi Maluku, 2019	126
Tabel 6.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Maluku, 2019.....	127
Tabel 6.9	Persentase Rumah Tanggayang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri/Bersama Rumah Tangga Tertentu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset di Provinsi Maluku, 2019.....	128
Tabel 6.10	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Maluku, 2019	129
Tabel 6.11	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Dari Sumur Bor/Pompa/Sumur/Mata Air Terlindung/Tak Terlindung Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Maluku, 2019.....	130
Tabel 6.12	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll di Provinsi Maluku, 2019	131
Tabel 6.13	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll dari Sumur Bor/Pompa/Sumur/Mata Air Terlindung/Tak Terlindung Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Maluku, 2019	132
Tabel 6.14	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air di Provinsi Maluku, 2019	133
Tabel 6.15	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama Rumah di Provinsi Maluku, 2019.....	134
Tabel 6.16	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak di Provinsi Maluku, 2019.....	135
Tabel 7.1	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019.....	143
Tabel 7.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir	

	Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019	144
Tabel 7.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Dekstop/Laptop/Notebook/Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019	145
Tabel 7.4	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019	146
Tabel 7.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah (PSTN), Komputer/Laptop Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019 ..	147
Tabel 8.1	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Provinsi Maluku, 2019	156
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin (Raskin) Selama 4 Bulan Terakhir (November 2018—Februari 2019) Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Beras yang Dibeli di Provinsi Maluku, 2019.....	157
Tabel 8.3	Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Raskin Menurut Kabupaten/Kota dan Harga Raskin yang Dibeli/Diterima (Rp) di Provinsi Maluku, 2019.....	158
Tabel 8.4	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kredit Usaha di Provinsi Maluku, 2019	159
Tabel 8.5	Persentase Rumah Tangga Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis PIP yang Diterima di Provinsi Maluku, 2019	160
Tabel 8.6	Persentase Rumah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Sosial yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019.....	161
Tabel 8.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera di Provinsi Maluku, 2019	162
Tabel 8.8	Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Aset Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kepemilikan Aset di Provinsi Maluku, 2019.....	163

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Piramida Penduduk Provinsi Maluku, 2019.....	9
Gambar 2.2 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota, 2019	10
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2019	72
Gambar 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7—12 Tahun, 13—15 Tahun, dan 16—18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019	73
Gambar 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019.....	74
Gambar 5.1 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2019	102
Gambar 5.2 Persentase Perempuan Berumur 15—49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah/Masih Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kabupaten/Kota, 2019	103
Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lantai Per Kapita (M ²) di Provinsi Maluku, 2019	116
Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Buang Air Besar, 2019.....	118
Gambar 7.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019	141
Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019	153

Halaman ini sengaja dikosongkan.

<https://maluku.bps.go.id>

DAFTAR SINGKATAN

BAB II. KEPENDUDUKAN

KRT	:	Kepala Rumah Tangga
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan

BAB III. PENDIDIKAN

APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
SD	:	Sekolah Dasar
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan

BAB IV. KESEHATAN

ASI	:	Air Susu Ibu
Baduta	:	Bawah Dua Tahun
Balita	:	Bawah Lima Tahun
BCG	:	<i>Bacillus Calmette Guerin</i>
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
DPT	:	Difteri, Pertusis, Tetanus
Jamkesda	:	Jaminan Kesehatan Daerah
Jamsostek	:	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	:	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu

BAB V. FERTILITAS DAN KB

AKDR	:	Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
IUD	:	<i>Intra Uterine Device</i>
KB	:	Keluarga Berencana
MKJP	:	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MOP	:	Metoda Operasi Pria
MOW	:	Metoda Operasi Wanita

BAB VI. PERUMAHAN

IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
MCK	:	Mandi, Cuci, Kakus
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
SHM	:	Surat Hak Milik

SHGB : Surat Hak Guna Bangunan
SHRS : Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun
SPAL : Saluran Pembuangan Air Limbah

BAB VII. LAIN-LAIN

AC : *Air Conditioner*
BBM : Blackberry Messenger
BSM : Bantuan Siswa Miskin
HP : Handphone
KG : Kilogram
KIP : Kartu Indonesia Pintar
KKS : Kartu Keluarga Sejahtera
KPS : Kartu Perlindungan Sosial
PC : Personal Computer
PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
PIP : Program Indonesia Pintar
PKH : Program Keluarga Harapan
Raskin : Beras Miskin
Rastra : Beras Sejahtera
KUB : Kelompok Usaha Bersama
KUBE : Kelompok Usaha Bersama
KUR : Kredit Usaha Rakyat

<https://maluku.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://maju.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan bernegara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan sosial-budaya. Pembangunan tersebut dilakukan baik oleh pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah.

Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya yang utama adalah perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik dan matang, mustahil proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, proses pembangunan jangka panjang juga memerlukan monitoring yang dilakukan terus-menerus dan akhirnya pembangunan juga perlu dievaluasi dan dinilai, apakah pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan awalnya atau tidak.

Dalam kaitannya dengan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, diperlukan dukungan data dan informasi yang memotret kondisi masyarakat secara akurat dan lengkap sehingga para perumus dan pengambil kebijakan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dengan dukungan data dan informasi yang lengkap serta akurat, kebutuhan masyarakat yang perlu dibangun dapat direncanakan dengan baik, demikian pula evaluasi terhadap hasilnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat diketahui sehingga perbaikan dan peningkatan di masa depan dapat dirumuskan.

Statistik Kesejahteraan Rakyat dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik memuat berbagai data statistik yang penting dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Perumahan, dan indikator sosial-ekonomi lainnya. Angka-angka Statistik Kesejahteraan Rakyat dihasilkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap tahun. Dari data statistik tersebut dapat disusun berbagai indikator penting misalnya seperti indikator rumah layak, air minum layak, angka kesakitan, sanitasi layak, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan lain sebagainya.

Pembangunan merupakan upaya Bersama yang membutuhkan kerja sama banyak pihak. Penyediaan Statistik Kesejahteraan Rakyat ini merupakan sumbangsih BPS bagi proses pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

1.2 Tujuan Penulisan

Penyusunan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data Statistik Kesejahteraan Rakyat secara berkala dan berkesinambungan. Data dan informasi dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Provinsi Maluku pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

1.3 Sumber Data

Seluruh data yang disajikan pada Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Tahun 2019 bersumber dari Susenas Maret 2019. Data disajikan dalam bentuk tabel persentase dan grafik menurut kabupaten dan kota. Pada beberapa tabel, data dibedakan menurut jenis kelamin yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian kesetaraan gender.

1.4 Metodologi

Tabel yang disajikan pada publikasi ini merupakan hasil pengolahan *raw* data Susenas Maret 2019. Faktor pengali/penimbang yang digunakan adalah hasil proyeksi penduduk Provinsi Maluku 2010—2035 menurut kabupaten/kota. Penduduk Provinsi Maluku 2019 berdasarkan proyeksi penduduk tersebut tercatat sebesar 1,77 juta jiwa.

1.5 Sistematika Penyajian

Publikasi ini terdiri atas pendahuluan dan ulasan singkat serta tabel pokok. Bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang, tujuan penulisan, sumber data, metodologi, dan sistematika penyajian. Bagian ulasan singkat tabel pokok terdiri dari bab Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Perumahan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Keadaan Sosial Ekonomi rumah tangga lainnya.

BAB II

KEPENDUDUKAN

2.1 Konsep Dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan berbagai konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Penduduk** didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial tertentu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
2. **Rasio jenis kelamin** didefinisikan sebagai perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
3. **Angka beban ketergantungan** didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0—14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan usia produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15—64 tahun (usia produktif).
4. **Belum kawin** didefinisikan sebagai status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan.
5. **Kawin** didefinisikan sebagai status dari mereka yang terikat perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.
6. **Cerai hidup** didefinisikan sebagai status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.
7. **Cerai mati** didefinisikan sebagai status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami/istrinya dan belum kawin lagi.
8. **Pernah kawin** didefinisikan sebagai status dari mereka yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.
9. **Akta kelahiran** didefinisikan sebagai surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS).

10. Nomor Induk Kependudukan (NIK) didefinisikan sebagai nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

2.2 Ulasan Singkat

Paradigma pembangunan negara dewasa ini telah bergeser dari yang sebelumnya mengejar pertumbuhan ekonomi semata menjadi peningkatan kualitas manusia atau penduduknya. Penduduk merupakan unsur utama pembangunan selain karena perannya sebagai pelaku, penduduk juga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dari proses pembangunan. Dengan kata lain, penduduk hadir dalam setiap tahapan pembangunan. Sebagai subjek, penduduk melaksanakan pembangunan melalui peran dan kontribusi di berbagai bidang, sementara sebagai objek, penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, dalam hal ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Peran penduduk yang vital dalam pembangunan membawa kita dalam topik diskusi lainnya terkait kuantitas dan kualitas penduduk. Penduduk yang banyak merupakan modal bagi pembangunan (tenaga kerja, iuran pajak, angkatan perang) namun di saat yang sama juga dapat menjadi beban bagi pembangunan karena semakin banyaknya penduduk berarti semakin besar pula permintaan akan sandang, pangan, papan sementara daya dukung negara dan lingkungan tak selalu sejalan. Berangkat dari kenyataan tersebut, diskusi mengenai kualitas dan kuantitas penduduk saat ini lebih banyak bermuara pada penduduk yang seimbang, artinya jumlah penduduk diupayakan tetap tumbuh stabil (fertilitas dan mortalitas yang seimbang) dan juga berkualitas tinggi (sehat, produktif, berpendidikan).

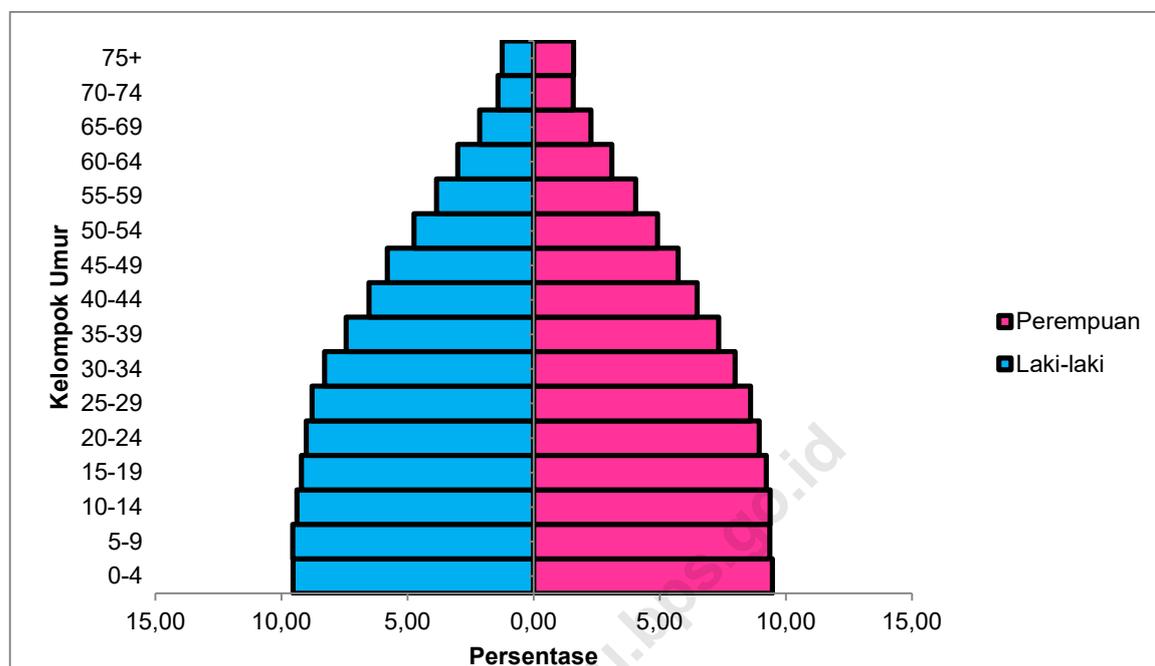
Dalam rangka mencapai kondisi kependudukan yang ideal, yaitu yang pertumbuhannya seimbang dan kualitasnya tinggi, diperlukan data dan informasi kependudukan. Susenas menyediakan beberapa di antaranya, yaitu: data penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, status perkawinan, kepemilikan akta kelahiran, serta kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Badan Pusat Statistik dan Bappenas memproyeksikan jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2019 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 mencapai sekitar 1,77 juta jiwa. Angka ini juga yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan tabulasi dalam publikasi ini.

Secara umum penduduk laki-laki Maluku lebih banyak dibandingkan perempuan (Gambar 2.1). Sementara itu, komposisi penduduk Provinsi Maluku berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk

menunjukkan bahwa frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki dan penduduk perempuan berada kelompok umur 0 – 4 tahun (Gambar 2.1).

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Provinsi Maluku, 2019

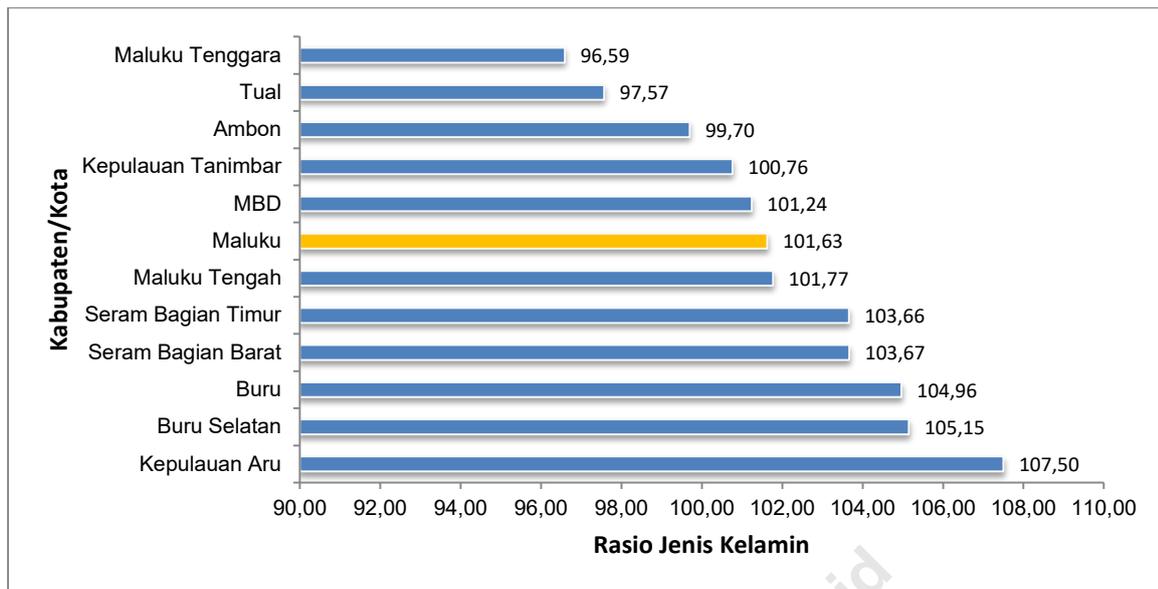


Sumber: Proyeksi Penduduk 2010—2035, BPS - Bappenas

Rasio jenis kelamin penduduk Maluku tahun 2019 sebesar 101,63. Angka tersebut berarti dari setiap 100 orang penduduk perempuan di Maluku terdapat sekitar 102 penduduk laki-laki atau penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Aru (107,50) disusul Kabupaten Buru Selatan (105,15). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan di Kabupaten Buru merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Kepulauan Aru terdapat 106 lebih penduduk laki-laki. Sementara itu, rasio jenis kelamin terendah tercatat ada di Kabupaten Maluku Tenggara (96,59), yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 atau 97 penduduk laki-laki (lihat Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota, 2019



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010—2035, BPS - Bappenas

Menurut hasil Susenas Maret 2019, angka beban ketergantungan/rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Maluku pada tahun 2019 tercatat sebesar 58,65. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 59 orang penduduk usia tidak produktif. Semakin besar angka ketergantungan, semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Persentase penduduk usia produktif dan tidak produktif secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.C. Secara umum, 32,63 persen penduduk Maluku tercatat berusia muda (0—14 tahun); 63,04 persen berusia produktif (15—64 tahun); dan 4,34 persen berusia 65 tahun ke atas. Proporsi penduduk usia produktif tertinggi tercatat di Kota Ambon (68,91 persen) dan terendah di Kabupaten Buru Selatan (56,09 persen). Hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan di Kota Ambon lebih rendah dibandingkan di Kabupaten Buru Selatan. Proporsi penduduk usia muda tertinggi tercatat berada di Kabupaten Buru Selatan (38,96 persen) dan terendah di Kota Ambon (27,22 persen). Sebaliknya, proporsi penduduk usia tua tertinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya (6,48 persen) dan terendah di Kabupaten Kepulauan Aru (2,93 persen).

Komposisi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut status perkawinan menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok laki-laki lebih besar dibanding perempuan, yakni 44,27 persen berbanding 35,98 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang tercatat berstatus cerai pada kelompok perempuan sebesar 10,75 persen, jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yang hanya 4,27 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.A hingga Tabel 2.4.C.

Dari sisi kelengkapan administrasi kependudukan, terkait kepemilikan akta kelahiran pada anak dengan usia 0-17 tahun di Maluku tercatat sebesar 78,66 persen memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu hak anak yang seyogianya dipenuhi karena data yang ada dalam akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti jati diri bagi anak, sehubungan dengan hak waris atau klaim asuransi dan pengurusan hal-hal administratif lainnya, seperti tunjangan keluarga, paspor, KTP, SIM, pengurusan perkawinan, perijinan, masuk sekolah, mengurus beasiswa, dan lain-lain. Berdasarkan Tabel 2.7.C tercatat Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kabupaten dengan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun terendah, yakni sebesar 65,35 persen, sementara itu yang tertinggi adalah Kota Ambon sebesar 87,45 persen. Kepemilikan akta kelahiran menunjukkan banyaknya penduduk yang kelahirannya dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persentase kepemilikan akte kelahiran pada anak umur 0 – 4 tahun lebih kecil dibanding anak usia 0 – 17 yaitu tercatat sebesar 51,60 persen. Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan daerah dengan kepemilikan akte kelahiran anak umur 0—4 tahun terendah, yaitu hanya 33,10 persen, sedangkan tertinggi di Kota Tual tercatat mencapai 67,51 persen. Data selengkapnya dapat dicermati pada Tabel 2.8.A. hingga Tabel 2.8.C.

Sementara itu persentase kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penduduk Maluku usia 0—4 tahun, 5 tahun ke atas, dan 17 tahun ke atas berturut-turut tercatat sebesar 56,36 persen; 90,31 persen; dan 90,82 persen. Hal ini patut diduga masih rendahnya kesadaran penduduk untuk segera mendaftarkan anggota rumah tangganya yang baru lahir untuk mendapatkan NIK. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.10 hingga Tabel 2.12.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berstatus kawin dengan pasangan tidak tinggal di satu rumah, dapat dipakai sebagai indikator kesejahteraan terutama terkait keharmonisan rumah tangga. Di Provinsi Maluku tercatat 96,54 persen penduduk usia 10 tahun ke atas berstatus kawin yang pasangannya tinggal dalam satu rumah. Artinya, hanya 3,46 persen penduduk Maluku usia 10 tahun ke atas berstatus kawin yang tercatat pasangannya tidak tinggal dalam satu rumah.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	50,10	49,90	100,00
02 Maluku Tenggara	49,13	50,87	100,00
03 Maluku Tengah	50,48	49,52	100,00
04 Buru	51,12	48,88	100,00
05 Kepulauan Aru	51,64	48,36	100,00
06 Seram Bagian Barat	50,96	49,04	100,00
07 Seram Bagian Timur	50,84	49,16	100,00
08 Maluku Barat Daya	50,16	49,84	100,00
09 Buru Selatan	51,32	48,68	100,00
71 Kota Ambon	50,55	49,45	100,00
72 Kota Tual	49,49	50,51	100,00
Maluku	50,56	49,44	100,00

Tabel 2.2

Persentase Penduduk Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	50,73	49,27	100,00
02 Maluku Tenggara	52,06	47,94	100,00
03 Maluku Tengah	51,69	48,31	100,00
04 Buru	51,05	48,95	100,00
05 Kepulauan Aru	52,38	47,62	100,00
06 Seram Bagian Barat	52,64	47,36	100,00
07 Seram Bagian Timur	50,90	49,10	100,00
08 Maluku Barat Daya	50,84	49,16	100,00
09 Buru Selatan	51,84	48,16	100,00
71 Kota Ambon	51,39	48,61	100,00
72 Kota Tual	50,79	49,21	100,00
Maluku	51,54	48,46	100,00

Tabel 2.3.A
Persentase Penduduk Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah
	0 – 14	15 – 64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	35,65	59,49	4,86	100,00
02 Maluku Tenggara	35,99	58,46	5,55	100,00
03 Maluku Tengah	32,58	62,47	4,95	100,00
04 Buru	34,73	61,32	3,95	100,00
05 Kepulauan Aru	34,38	62,76	2,86	100,00
06 Seram Bagian Barat	37,72	58,03	4,25	100,00
07 Seram Bagian Timur	35,74	60,79	3,47	100,00
08 Maluku Barat Daya	35,38	59,14	5,48	100,00
09 Buru Selatan	39,19	57,83	2,98	100,00
71 Kota Ambon	27,69	68,53	3,78	100,00
72 Kota Tual	35,17	61,42	3,42	100,00
Maluku	33,08	62,72	4,20	100,00

Tabel 2.3.B
Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah
	0 – 14	15 – 64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	34,45	60,05	5,50	100,00
02 Maluku Tenggara	32,53	60,79	6,69	100,00
03 Maluku Tengah	31,65	63,04	5,31	100,00
04 Buru	34,38	62,02	3,60	100,00
05 Kepulauan Aru	35,54	61,46	3,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	36,87	59,38	3,75	100,00
07 Seram Bagian Timur	35,75	60,82	3,43	100,00
08 Maluku Barat Daya	34,30	58,22	7,48	100,00
09 Buru Selatan	38,73	58,36	2,91	100,00
71 Kota Ambon	26,74	69,29	3,97	100,00
72 Kota Tual	32,99	62,97	4,04	100,00
Maluku	32,16	63,36	4,48	100,00

Tabel 2.3.C
Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah
	0 – 14	15 – 64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	35,05	59,77	5,18	100,00
02 Maluku Tenggara	34,23	59,64	6,13	100,00
03 Maluku Tengah	32,12	62,75	5,13	100,00
04 Buru	34,56	61,66	3,78	100,00
05 Kepulauan Aru	34,94	62,13	2,93	100,00
06 Seram Bagian Barat	37,30	58,69	4,01	100,00
07 Seram Bagian Timur	35,75	60,80	3,45	100,00
08 Maluku Barat Daya	34,84	58,68	6,48	100,00
09 Buru Selatan	38,96	58,09	2,95	100,00
71 Kota Ambon	27,22	68,91	3,87	100,00
72 Kota Tual	34,07	62,20	3,73	100,00
Maluku	32,63	63,04	4,34	100,00

Tabel 2.4.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	36,53	60,47	0,56	2,45	100,00
02 Maluku Tenggara	44,27	51,67	1,09	2,97	100,00
03 Maluku Tengah	42,86	52,40	1,99	2,75	100,00
04 Buru	41,77	55,53	0,64	2,06	100,00
05 Kepulauan Aru	42,31	53,14	1,46	3,09	100,00
06 Seram Bagian Barat	43,25	53,41	0,99	2,35	100,00
07 Seram Bagian Timur	43,21	52,00	1,02	3,77	100,00
08 Maluku Barat Daya	42,80	53,15	0,38	3,67	100,00
09 Buru Selatan	44,58	52,47	0,58	2,37	100,00
71 Kota Ambon	48,30	46,49	1,68	3,52	100,00
72 Kota Tual	47,97	49,11	0,71	2,20	100,00
Maluku	44,27	51,46	1,32	2,95	100,00

Tabel 2.4.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	29,06	62,97	1,46	6,51	100,00
02 Maluku Tenggara	33,84	50,70	3,78	11,68	100,00
03 Maluku Tengah	35,57	55,12	2,15	7,17	100,00
04 Buru	34,82	56,89	2,04	6,25	100,00
05 Kepulauan Aru	33,71	57,70	1,66	6,92	100,00
06 Seram Bagian Barat	35,43	56,38	1,12	7,07	100,00
07 Seram Bagian Timur	36,04	54,71	2,09	7,17	100,00
08 Maluku Barat Daya	33,34	53,48	1,24	11,93	100,00
09 Buru Selatan	35,99	55,30	2,07	6,64	100,00
71 Kota Ambon	38,74	47,44	3,95	9,86	100,00
72 Kota Tual	41,07	49,46	1,08	8,39	100,00
Maluku	35,98	53,27	2,49	8,26	100,00

Tabel 2.4.C

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	32,79	61,72	1,01	4,48	100,00
02 Maluku Tenggara	38,89	51,17	2,48	7,46	100,00
03 Maluku Tengah	39,24	53,75	2,07	4,94	100,00
04 Buru	38,37	56,20	1,32	4,11	100,00
05 Kepulauan Aru	38,18	55,33	1,56	4,93	100,00
06 Seram Bagian Barat	39,41	54,87	1,05	4,67	100,00
07 Seram Bagian Timur	39,69	53,33	1,55	5,43	100,00
08 Maluku Barat Daya	38,07	53,32	0,81	7,80	100,00
09 Buru Selatan	40,39	53,85	1,31	4,45	100,00
71 Kota Ambon	43,56	46,96	2,81	6,67	100,00
72 Kota Tual	44,46	49,29	0,90	5,35	100,00
Maluku	40,15	52,36	1,90	5,58	100,00

Tabel 2.5.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15 – 49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	34,60	64,10	0,64	0,66	100,00
02 Maluku Tenggara	46,19	52,14	1,18	0,49	100,00
03 Maluku Tengah	44,53	53,86	1,56	0,06	100,00
04 Buru	40,12	58,05	0,89	0,95	100,00
05 Kepulauan Aru	40,84	55,97	1,72	1,47	100,00
06 Seram Bagian Barat	41,26	57,30	0,95	0,48	100,00
07 Seram Bagian Timur	42,21	56,09	0,56	1,14	100,00
08 Maluku Barat Daya	44,46	53,43	0,53	1,58	100,00
09 Buru Selatan	39,45	59,09	0,58	0,88	100,00
71 Kota Ambon	51,07	46,12	1,31	1,50	100,00
72 Kota Tual	47,28	51,16	1,03	0,54	100,00
Maluku	44,92	53,02	1,16	0,90	100,00

Tabel 2.5.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 – 49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	24,06	73,50	1,29	1,15	100,00
02 Maluku Tenggara	32,70	61,48	3,58	2,24	100,00
03 Maluku Tengah	33,87	61,89	2,19	2,05	100,00
04 Buru	29,82	66,27	2,39	1,52	100,00
05 Kepulauan Aru	28,69	66,70	2,22	2,39	100,00
06 Seram Bagian Barat	29,83	66,96	1,16	2,05	100,00
07 Seram Bagian Timur	31,66	64,27	2,69	1,38	100,00
08 Maluku Barat Daya	32,39	62,51	2,01	3,09	100,00
09 Buru Selatan	27,11	69,29	2,48	1,12	100,00
71 Kota Ambon	39,31	52,84	3,97	3,87	100,00
72 Kota Tual	38,72	57,35	1,46	2,47	100,00
Maluku	33,69	61,15	2,66	2,50	100,00

Tabel 2.5.C

Persentase Penduduk Berumur 15 – 49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	29,36	68,77	0,96	0,90	100,00
02 Maluku Tenggara	39,28	56,92	2,41	1,39	100,00
03 Maluku Tengah	39,24	57,84	1,87	1,05	100,00
04 Buru	35,02	62,12	1,63	1,23	100,00
05 Kepulauan Aru	35,08	61,06	1,96	1,91	100,00
06 Seram Bagian Barat	35,60	62,08	1,06	1,26	100,00
07 Seram Bagian Timur	36,99	60,14	1,61	1,26	100,00
08 Maluku Barat Daya	38,55	57,87	1,25	2,32	100,00
09 Buru Selatan	33,46	64,04	1,50	0,99	100,00
71 Kota Ambon	45,30	49,42	2,62	2,67	100,00
72 Kota Tual	42,93	54,30	1,25	1,52	100,00
Maluku	39,37	57,04	1,90	1,69	100,00

Tabel 2.6.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15 – 19 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	99,16	0,84	0,00	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	97,47	2,53	0,00	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 Buru	98,90	1,10	0,00	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	98,00	2,00	0,00	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	99,56	0,44	0,00	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09 Buru Selatan	99,00	1,00	0,00	0,00	100,00
71 Kota Ambon	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 Kota Tual	99,69	0,31	0,00	0,00	100,00
Maluku	99,54	0,46	0,00	0,00	100,00

Tabel 2.6.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 – 19 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	86,71	13,29	0,00	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	91,51	8,49	0,00	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	93,05	4,91	1,02	1,02	100,00
04 Buru	88,53	11,47	0,00	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	97,88	2,12	0,00	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	96,37	2,65	0,97	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	92,14	7,86	0,00	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	95,15	3,71	1,14	0,00	100,00
09 Buru Selatan	93,07	6,26	0,66	0,00	100,00
71 Kota Ambon	97,22	1,27	1,52	0,00	100,00
72 Kota Tual	94,19	4,35	0,53	0,92	100,00
Maluku	94,00	4,93	0,81	0,26	100,00

Tabel 2.6.C

Persentase Penduduk Berumur 15 – 19 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	93,14	6,86	0,00	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	94,60	5,40	0,00	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	96,70	2,33	0,48	0,48	100,00
04 Buru	93,70	6,30	0,00	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	97,94	2,06	0,00	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	98,25	1,28	0,47	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	96,00	4,00	0,00	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	97,64	1,81	0,56	0,00	100,00
09 Buru Selatan	96,30	3,39	0,30	0,00	100,00
71 Kota Ambon	98,64	0,62	0,74	0,00	100,00
72 Kota Tual	96,95	2,33	0,27	0,46	100,00
Maluku	96,87	2,62	0,39	0,12	100,00

Tabel 2.7.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 0 – 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	61,38	13,86	24,76	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	45,43	35,78	18,79	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	57,12	21,81	21,07	0,00	100,00
04 Buru	60,37	20,72	18,47	0,44	100,00
05 Kepulauan Aru	33,17	32,16	32,98	1,69	100,00
06 Seram Bagian Barat	60,16	12,74	25,76	1,34	100,00
07 Seram Bagian Timur	36,87	30,89	32,05	0,19	100,00
08 Maluku Barat Daya	59,58	11,25	29,09	0,08	100,00
09 Buru Selatan	48,42	26,75	24,41	0,42	100,00
71 Kota Ambon	59,88	27,61	12,25	0,25	100,00
72 Kota Tual	34,12	53,50	12,39	0,00	100,00
Maluku	53,86	24,76	21,02	0,36	100,00

Tabel 2.7.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 0 – 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	55,66	18,88	25,45	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	36,94	45,12	17,94	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	55,81	23,98	20,21	0,00	100,00
04 Buru	60,24	21,08	18,22	0,45	100,00
05 Kepulauan Aru	32,94	32,41	33,31	1,34	100,00
06 Seram Bagian Barat	60,45	13,74	25,39	0,42	100,00
07 Seram Bagian Timur	38,33	25,27	36,02	0,37	100,00
08 Maluku Barat Daya	61,99	13,04	24,97	0,00	100,00
09 Buru Selatan	44,69	30,78	24,20	0,33	100,00
71 Kota Ambon	57,07	30,34	12,59	0,00	100,00
72 Kota Tual	41,18	43,69	15,13	0,00	100,00
Maluku	52,51	26,20	21,10	0,20	100,00

Tabel 2.7.C

Persentase Penduduk Berumur 0 – 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	58,60	16,30	25,10	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	41,30	40,32	18,38	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	56,50	22,85	20,66	0,00	100,00
04 Buru	60,30	20,90	18,35	0,45	100,00
05 Kepulauan Aru	33,06	32,29	33,15	1,51	100,00
06 Seram Bagian Barat	60,31	13,23	25,57	0,89	100,00
07 Seram Bagian Timur	37,57	28,18	33,96	0,28	100,00
08 Maluku Barat Daya	60,78	12,14	27,04	0,04	100,00
09 Buru Selatan	46,61	28,70	24,31	0,38	100,00
71 Kota Ambon	58,50	28,95	12,42	0,13	100,00
72 Kota Tual	37,51	48,79	13,70	0,00	100,00
Maluku	53,20	25,46	21,06	0,28	100,00

Tabel 2.8.A

Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0 – 4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	51,46	4,69	43,84	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	32,22	20,06	47,72	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	37,29	9,53	53,17	0,00	100,00
04 Buru	49,75	11,35	38,90	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	23,74	13,42	60,35	2,50	100,00
06 Seram Bagian Barat	24,11	8,93	66,15	0,81	100,00
07 Seram Bagian Timur	27,31	24,67	48,02	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	39,46	5,11	55,44	0,00	100,00
09 Buru Selatan	29,05	15,87	54,60	0,48	100,00
71 Kota Ambon	44,27	17,85	36,92	0,96	100,00
72 Kota Tual	25,34	44,77	29,89	0,00	100,00
Maluku	36,89	14,74	47,91	0,46	100,00

Tabel 2.8.B

Persentase Anak Perempuan Berumur 0 – 4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	30,98	13,85	55,17	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	25,92	31,93	42,15	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	32,50	20,58	46,91	0,00	100,00
04 Buru	41,43	16,08	42,49	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	20,54	21,10	55,59	2,78	100,00
06 Seram Bagian Barat	28,26	4,91	66,83	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	30,48	11,81	57,17	0,54	100,00
08 Maluku Barat Daya	35,42	10,71	53,87	0,00	100,00
09 Buru Selatan	32,15	20,73	47,11	0,00	100,00
71 Kota Ambon	36,65	25,70	37,65	0,00	100,00
72 Kota Tual	33,33	31,46	35,21	0,00	100,00
Maluku	32,40	19,17	48,22	0,22	100,00

Tabel 2.8.C

Persentase Anak Berumur 0 – 4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	41,27	9,25	49,48	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	29,18	25,78	45,04	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	34,95	14,94	50,11	0,00	100,00
04 Buru	45,66	13,68	40,66	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	22,18	17,15	58,03	2,64	100,00
06 Seram Bagian Barat	26,25	6,85	66,50	0,39	100,00
07 Seram Bagian Timur	28,89	18,26	52,58	0,27	100,00
08 Maluku Barat Daya	37,46	7,88	54,66	0,00	100,00
09 Buru Selatan	30,54	18,21	51,00	0,25	100,00
71 Kota Ambon	40,64	21,59	37,27	0,50	100,00
72 Kota Tual	29,24	38,27	32,49	0,00	100,00
Maluku	34,69	16,91	48,06	0,34	100,00

Tabel 2.9

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Berstatus Kawin yang Pasangannya Biasa Tinggal di Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	99,03	96,53	97,75
02 Maluku Tenggara	96,37	93,38	94,84
03 Maluku Tengah	97,72	94,44	96,05
04 Buru	95,95	98,50	97,21
05 Kepulauan Aru	97,69	96,69	97,19
06 Seram Bagian Barat	98,55	96,37	97,45
07 Seram Bagian Timur	97,35	97,38	97,36
08 Maluku Barat Daya	97,90	97,39	97,64
09 Buru Selatan	97,39	97,82	97,61
71 Kota Ambon	96,17	95,74	95,95
72 Kota Tual	96,88	93,13	94,96
Maluku	97,22	95,86	96,54

Tabel 2.10

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	83,47	83,01	83,24
02 Maluku Tenggara	94,28	95,73	95,02
03 Maluku Tengah	86,00	88,30	87,14
04 Buru	92,41	92,64	92,52
05 Kepulauan Aru	89,72	85,81	87,83
06 Seram Bagian Barat	88,08	87,60	87,84
07 Seram Bagian Timur	85,43	82,60	84,04
08 Maluku Barat Daya	91,69	91,03	91,36
09 Buru Selatan	93,03	93,95	93,48
71 Kota Ambon	94,61	94,12	94,37
72 Kota Tual	93,63	94,95	94,30
Maluku	90,27	90,35	90,31

Tabel 2.11

Persentase Penduduk Berumur 17 Tahun ke Atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	83,54	84,24	83,90
02 Maluku Tenggara	94,70	95,66	95,20
03 Maluku Tengah	85,82	88,35	87,09
04 Buru	92,76	92,30	92,54
05 Kepulauan Aru	89,64	88,59	89,14
06 Seram Bagian Barat	88,41	87,30	87,87
07 Seram Bagian Timur	85,42	82,97	84,21
08 Maluku Barat Daya	93,02	93,19	93,11
09 Buru Selatan	93,74	94,55	94,14
71 Kota Ambon	95,15	94,71	94,93
72 Kota Tual	95,53	95,15	95,33
Maluku	90,72	90,91	90,82

Tabel 2.12

Persentase Anak Berumur 0 – 4 Tahun yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	61,26	50,37	55,84
02 Maluku Tenggara	56,10	62,32	59,10
03 Maluku Tengah	47,69	53,42	50,50
04 Buru	71,36	69,20	70,30
05 Kepulauan Aru	50,44	45,07	47,83
06 Seram Bagian Barat	48,38	51,34	49,91
07 Seram Bagian Timur	65,41	56,01	60,72
08 Maluku Barat Daya	58,01	56,60	57,31
09 Buru Selatan	57,34	59,33	58,30
71 Kota Ambon	59,51	53,90	56,84
72 Kota Tual	68,20	65,94	67,10
Maluku	57,08	55,61	56,36

BAB III

KESEHATAN

<https://maluku.bp.go.id>

3.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan berbagai konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Keluhan kesehatan** didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk, seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.
2. **Menderita sakit** didefinisikan sebagai mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal, seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya).
3. **Lamanya terganggu** didefinisikan sebagai lamanya hari dalam 1 bulan seseorang terganggu kegiatan sehari-harinya dan tidak merujuk pada keluhan yang terberat saja, mencakup jumlah hari untuk semua keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir.
4. **Berobat jalan** didefinisikan sebagai upaya anggota rumah tangga (ART) yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah ART.
5. **Mengobati sendiri** didefinisikan sebagai upaya oleh anggota rumah tangga/keluarga dengan melakukan pengobatan sendiri (tanpa datang ke tempat fasilitas kesehatan atau memanggil dokter/petugas kesehatan ke rumahnya), agar sembuh atau lebih ringan keluhan kesehatannya, misal dengan cara minum obat modern, jamu, kerokan, kompres, pijat, dan lain lain.
6. **Jaminan kesehatan** didefinisikan sebagai program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
7. **Rawat inap** didefinisikan sebagai upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan menginap 1 malam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern

atau tradisional, termasuk dalam kejadian ini adalah rawat inap untuk persalinan.

3.2 Ulasan Singkat

Pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pencapaian pembangunan kesehatan ditandai dengan terciptanya masyarakat yang secara proaktif berperilaku sehat dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan sasaran untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015—2019 adalah (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan (Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, hal. 6).

Sejalan dengan tujuan pembangunan di bidang kesehatan tersebut, Bab ini akan menyajikan data statistik kesehatan yang mencakup informasi penolong kelahiran, keluhan kesehatan, angka kesakitan, cara berobat, dan penggunaan jaminan kesehatan.

Data tempat melahirkan dan penolong kelahiran bayi memberikan informasi tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dari sisi kesehatan ibu dan anak, persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai serta ditolong oleh tenaga medis, seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, famili, atau lainnya.

Tingkat kesakitan (*morbidity rate*) yang pada publikasi ini didekati dengan keluhan kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk. Pada tahun 2019, sebesar 18,09 persen penduduk laki-laki di Maluku tercatat mengalami keluhan kesehatan, sedangkan penduduk perempuan di Maluku yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 20,67 persen. Pada Tabel 3.2,

terlihat bahwa persentase tertinggi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan secara umum tercatat di Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu sebesar 24,82 persen, dengan keluhan kesehatan penduduk laki-laki sebesar 24,86 persen dan penduduk perempuan sebesar 24,78 persen. Sementara itu kabupaten/kota dengan persentase penduduk mengalami keluhan kesehatan terendah tercatat di Kabupaten Maluku Tengah, yaitu sebesar 16,08 persen, dengan keluhan kesehatan penduduk laki-laki sebesar 15,19 persen dan penduduk perempuan sebesar 17,00 persen.

Indikator tingkat kesakitan (*morbidity rate*) dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Indikator ini bisa dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dengan jumlah keseluruhan penduduk. Penduduk yang tercatat mengalami gangguan kesehatan adalah mereka yang karena keluhan kesehatan yang dialaminya, menyebabkan tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya.

Angka kesakitan memberikan gambaran tentang besarnya keluhan kesehatan yang dialami penduduk yang dapat mengganggu kegiatan sehari-harinya. Angka kesakitan penduduk di Maluku tercatat sebesar 11,19 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang yang mengalami keluhan kesehatan, 11 orang di antaranya merasa bahwa keluhannya itu menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Angka kesakitan yang paling besar tercatat dialami oleh penduduk Kabupaten Buru (17,07 persen). Angka kesakitan yang tinggi ini perlu mendapat penanganan mengingat tingkat kesakitan yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat produktivitas penduduk yang pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya peluang dalam perekonomian. Kabupaten Maluku Tengah tercatat memiliki penduduk dengan tingkat kesakitan terendah di Maluku, yaitu sebesar 8,92 persen.

Informasi lain yang juga penting dalam bab ini adalah karakteristik pengobatan. Karakteristik pengobatan yang dimaksud adalah bagaimana cara pengobatan (berobat jalan atau rawat inap), pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang ada, seperti rumah sakit, dokter praktik, poliklinik, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, penggunaan jaminan kesehatan, alasan tidak berobat jalan, serta lamanya masyarakat melakukan rawat inap.

Karakteristik pertama yang dibahas terkait cara pengobatan adalah pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang ada. Sebesar 40,51 persen penduduk Maluku yang mengalami keluhan kesehatan tercatat melakukan pengobatan dengan cara berobat jalan (Tabel 3.4). Hal ini berarti sebesar 49,49 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tidak berobat jalan.

Pada Tabel 3.5.A hingga Tabel 3.5.C dapat dicermati tempat/fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju oleh masyarakat untuk berobat jalan. Ada dua kelompok tempat/fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa dituju oleh masyarakat untuk berobat jalan, yaitu fasilitas kesehatan (rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktik dokter/bidan, klinik/praktik dokter bersama, puskesmas/puskesmas pembantu (pustu), Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat) dan fasilitas non kesehatan (praktik pengobatan tradisional/alternatif atau tempat lainnya). Susenas 2019 mencatat, penduduk Maluku yang mengalami keluhan atau gangguan kesehatan cenderung lebih memilih tempat pelayanan kesehatan yang relatif dekat dengan tempat tinggalnya untuk mendapatkan pengobatan. Berturut-turut tempat/fasilitas pelayanan kesehatan yang tercatat paling banyak diminati oleh penduduk Maluku untuk berobat jalan adalah puskesmas/pustu sebesar 54,36 persen, praktik dokter/bidan sebesar 26,71 persen, RS Pemerintah sebesar 9,99 persen, dan Klinik/Praktik Dokter Bersama sebesar 7,26 persen.

Tempat praktik puskesmas/pustu paling banyak dipilih masyarakat karena tempat tersebut terdapat di setiap kecamatan dan masih terbatasnya rumah sakit di beberapa kabupaten/kota di Maluku. Kabupaten/Kota yang penduduknya tercatat memanfaatkan puskesmas/pustu di bawah rata-rata Maluku adalah Kabupaten Buru sebesar 25,64 persen, Kabupaten Maluku Tengah sebesar 39,68 persen, Kota Ambon sebesar 49,37 persen, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar 50,32 persen. Data selengkapnya dapat dicermati pada Tabel 3.5.A hingga Tabel 3.5.C.

Alasan penduduk Maluku tidak berobat jalan, padahal mengalami keluhan kesehatan yang tercatat paling menonjol adalah karena melakukan pengobatan sendiri, yaitu sebesar 61,19 persen, alasan lain adalah merasa tidak perlu (31,91 persen) dan tidak mempunyai biaya berobat (2,86 persen). Sementara itu, alasan tidak ada biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, waktu tunggu pelayanan lama, dan alasan tidak ada yang mendampingi berkisar di bawah 1,75 persen.

Pada bab kesehatan ini juga dibahas terkait karakteristik penduduk yang pernah menjalani rawat inap selama setahun terakhir. Tabel 3.8 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sebesar 2,95 persen penduduk Maluku tercatat pernah menjalani rawat inap. Terdapat kecenderungan persentase penduduk perempuan yang pernah menjalani rawat inap lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Fasilitas kesehatan yang

tercatat relatif banyak dimanfaatkan penduduk untuk menjalani rawat inap (Tabel 3.8.A hingga Tabel 3.8.C) adalah Rumah Sakit Pemerintah (68,70 persen), Rumah Sakit Swasta (22,19 persen), dan Puskesmas/Pustu (6,84 persen). Fasilitas kesehatan berupa praktik dokter/bidan, klinik/praktik dokter bersama, dan praktik pengobatan tradisional/alternatif hanya dimanfaatkan masing-masing sebesar kurang dari tiga persen penduduk Maluku untuk menjalani rawat inap. Sementara di Kabupaten Maluku Barat Daya lebih dari 63 persen penduduknya memanfaatkan puskesmas/pustu untuk menjalani rawat inap.

<https://maluku.bps.go.id>

Tabel 3.1.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Memiliki BPJS PBI		Memiliki BPJS Non-PBI		Memiliki Jamkesda		Memiliki Jaminan Kesehatan Asuransi Swasta		Memiliki Jaminan Kesehatan dari Perusahaan/Kantor		Kepemilikan Jaminan Kesehatan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01 Kepulauan Tanimbar	35,28	64,72	21,07	78,93	0,55	99,45	0,00	100,00	0,00	100,00	56,90	43,10
02 Maluku Tenggara	49,02	50,98	13,65	86,35	17,38	82,62	0,00	100,00	0,32	99,68	80,23	19,77
03 Maluku Tengah	29,91	70,09	15,23	84,77	2,34	97,66	0,13	99,87	0,74	99,26	47,99	52,01
04 Buru	36,38	63,62	12,67	87,33	0,56	99,44	0,11	99,89	0,00	100,00	49,06	50,94
05 Kepulauan Aru	27,40	72,60	9,03	90,97	13,94	86,06	0,02	99,98	0,39	99,61	48,61	51,39
06 Seram Bagian Barat	33,03	66,97	12,04	87,96	0,60	99,40	0,00	100,00	0,27	99,73	45,73	54,63
07 Seram Bagian Timur	32,69	67,31	9,37	90,63	1,02	98,98	0,00	100,00	0,00	100,00	43,08	56,92
08 Maluku Barat Daya	47,92	52,08	4,41	95,59	53,43	46,57	0,00	100,00	0,00	100,00	97,00	3,00
09 Buru Selatan	36,07	63,93	7,85	92,15	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	43,92	56,08
71 Kota Ambon	20,39	79,61	44,45	55,55	1,44	98,56	0,00	100,00	0,62	99,38	66,91	33,09
72 Kota Tual	47,14	52,86	21,41	78,59	18,94	81,06	0,00	100,00	0,00	100,00	81,63	18,37
Maluku	31,27	68,73	21,55	78,45	5,70	94,30	0,04	99,96	0,38	99,62	41,96	41,96

Tabel 3.1.B

Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Memiliki BPJS PBI		Memiliki BPJS Non-PBI		Memiliki Jamkesda		Memiliki Jaminan Kesehatan Asuransi Swasta		Memiliki Jaminan Kesehatan dari Perusahaan/Kantor		Kepemilikan Jaminan Kesehatan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01 Kepulauan Tanimbar	36,97	63,03	18,01	81,99	0,77	99,23	0,00	100,00	0,00	100,00	55,75	44,25
02 Maluku Tenggara	48,38	51,62	13,29	86,71	17,66	82,34	0,00	100,00	0,01	99,99	79,22	20,78
03 Maluku Tengah	31,90	68,10	15,55	84,45	2,87	97,13	0,04	99,96	0,59	99,41	50,76	49,24
04 Buru	35,90	64,10	13,33	86,67	0,25	99,75	0,00	100,00	0,00	100,00	49,23	50,77
05 Kepulauan Aru	29,62	70,38	9,40	90,60	14,21	85,79	0,00	100,00	0,17	99,83	50,92	49,08
06 Seram Bagian Barat	33,17	66,83	11,71	88,29	0,74	99,26	0,00	100,00	0,14	99,86	45,20	54,80
07 Seram Bagian Timur	30,69	69,31	9,56	90,44	0,60	99,40	0,00	100,00	0,00	100,00	40,85	59,15
08 Maluku Barat Daya	52,39	47,61	4,84	95,16	49,38	50,62	0,00	100,00	0,00	100,00	97,18	2,82
09 Buru Selatan	36,73	63,27	7,57	92,43	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,30	55,70
71 Kota Ambon	21,67	78,33	44,93	55,07	0,68	99,32	0,00	100,00	0,87	99,13	68,09	31,91
72 Kota Tual	45,53	54,47	20,90	79,10	20,54	79,46	0,00	100,00	0,00	100,00	81,58	18,42
Maluku	32,29	67,71	21,61	78,39	5,61	94,39	0,01	99,99	0,38	99,62	59,01	40,99

Tabel 3.1.C

Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Memiliki BPJS PBI		Memiliki BPJS Non-PBI		Memiliki Jamkesda		Memiliki Jaminan Kesehatan Asuransi Swasta		Memiliki Jaminan Kesehatan dari Perusahaan/Kantor		Kepemilikan Jaminan Kesehatan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01 Kepulauan Tanimbar	36,12	63,88	19,54	80,46	0,66	99,34	0,00	100,00	0,00	100,00	56,33	43,67
02 Maluku Tenggara	48,69	51,31	13,47	86,53	17,52	82,48	0,00	100,00	0,16	99,84	79,72	20,28
03 Maluku Tengah	30,89	69,11	15,39	84,61	2,60	97,40	0,09	99,91	0,67	99,33	49,36	50,64
04 Buru	36,15	63,85	13,00	87,00	0,41	99,59	0,06	99,94	0,00	100,00	49,14	50,86
05 Kepulauan Aru	28,47	71,53	9,21	90,79	14,07	85,93	0,01	99,99	0,29	99,71	49,73	50,27
06 Seram Bagian Barat	33,10	66,90	11,88	88,12	0,67	99,33	0,00	100,00	0,21	99,79	45,29	54,71
07 Seram Bagian Timur	31,71	68,29	9,46	90,54	0,81	99,19	0,00	100,00	0,00	100,00	41,99	58,01
08 Maluku Barat Daya	50,15	49,85	4,63	95,37	51,41	48,59	0,00	100,00	0,00	100,00	97,09	2,91
09 Buru Selatan	36,39	63,61	7,71	92,29	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,11	55,89
71 Kota Ambon	21,02	78,98	44,69	55,31	1,07	98,93	0,00	100,00	0,75	99,25	67,49	32,51
72 Kota Tual	46,33	53,67	21,15	78,85	19,75	80,25	0,00	100,00	0,00	100,00	81,61	18,39
Maluku	31,78	68,22	21,58	78,42	5,65	94,35	0,02	99,98	0,38	99,62	58,52	41,48

Tabel 3.2

Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dalam 1 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	16,35	17,15	16,75
02 Maluku Tenggara	15,64	20,95	18,34
03 Maluku Tengah	15,19	17,00	16,08
04 Buru	22,54	24,88	23,69
05 Kepulauan Aru	14,42	19,71	16,98
06 Seram Bagian Barat	17,24	20,61	18,89
07 Seram Bagian Timur	24,86	24,78	24,82
08 Maluku Barat Daya	15,00	18,53	16,76
09 Buru Selatan	19,30	21,36	20,30
71 Kota Ambon	19,56	22,39	20,96
72 Kota Tual	18,79	21,73	20,28
Maluku	18,09	20,67	19,37

Tabel 3.3

Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan dalam 1 Bulan Terakhir (Angka Kesakitan)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	10,63	12,20	11,41
02 Maluku Tenggara	10,83	14,49	12,69
03 Maluku Tengah	8,44	7,51	7,98
04 Buru	16,34	17,84	17,07
05 Kepulauan Aru	8,00	9,91	8,92
06 Seram Bagian Barat	10,19	10,98	10,58
07 Seram Bagian Timur	14,89	15,14	15,01
08 Maluku Barat Daya	8,22	11,82	10,01
09 Buru Selatan	15,03	15,06	15,05
71 Kota Ambon	10,38	10,21	10,30
72 Kota Tual	13,97	17,29	15,65
Maluku	10,86	11,52	11,19

Tabel 3.4

Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	37,80	37,54	37,66
02 Maluku Tenggara	72,79	74,02	73,51
03 Maluku Tengah	34,29	30,47	32,29
04 Buru	36,00	36,72	36,37
05 Kepulauan Aru	45,34	40,85	42,82
06 Seram Bagian Barat	40,70	39,27	39,94
07 Seram Bagian Timur	27,08	32,41	29,70
08 Maluku Barat Daya	47,60	53,85	51,05
09 Buru Selatan	39,58	35,27	37,37
71 Kota Ambon	48,61	35,10	41,48
72 Kota Tual	50,48	54,68	52,75
Maluku	42,31	38,90	40,51

Tabel 3.5.A

Persentase Penduduk Laki—Laki yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tempat Berobat Jalan							
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktik Batra/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	21,37	2,34	19,71	2,13	54,48	3,70	0,73	0,00
02 Maluku Tenggara	11,46	2,43	8,12	2,69	61,32	16,01	0,00	0,00
03 Maluku Tengah	12,44	0,00	33,09	10,55	42,79	2,43	2,30	4,76
04 Buru	9,45	0,00	44,06	12,00	26,22	13,51	0,93	0,37
05 Kepulauan Aru	10,97	0,38	20,70	0,00	66,27	3,50	0,00	0,00
06 Seram Bagian Barat	7,26	0,00	31,53	6,02	56,34	1,36	0,00	1,00
07 Seram Bagian Timur	5,08	0,00	15,69	2,62	82,85	1,07	4,51	0,00
08 Maluku Barat Daya	0,00	0,00	1,51	0,73	96,47	1,41	0,70	0,59
09 Buru Selatan	12,05	0,00	48,69	1,63	52,89	0,36	0,00	0,00
71 Kota Ambon	7,30	3,35	33,13	11,51	46,72	0,00	1,17	0,88
72 Kota Tual	11,97	1,41	11,14	2,91	74,08	1,91	0,00	1,16
Maluku	9,42	1,50	27,92	7,52	53,25	3,47	1,11	1,16

Tabel 3.5.B

Persentase Penduduk Perempuan yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tempat Berobat Jalan							
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktik Batra/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	24,21	1,32	29,53	0,42	46,32	5,55	0,10	0,00
02 Maluku Tenggara	7,32	2,81	9,32	7,64	59,27	16,25	0,00	0,00
03 Maluku Tengah	18,54	1,38	41,91	1,28	36,48	4,88	0,00	0,00
04 Buru	10,65	0,96	39,17	14,69	25,09	11,18	1,15	0,35
05 Kepulauan Aru	13,75	0,00	23,58	4,26	59,19	1,14	0,53	0,30
06 Seram Bagian Barat	3,61	0,00	29,14	4,59	61,52	4,40	0,86	2,00
07 Seram Bagian Timur	0,13	0,00	5,25	1,85	87,64	4,30	1,75	4,49
08 Maluku Barat Daya	2,01	0,00	3,96	6,03	88,34	4,37	1,29	0,89
09 Buru Selatan	12,01	0,00	43,20	1,01	60,61	3,85	1,18	0,00
71 Kota Ambon	10,76	3,12	27,56	12,99	52,64	0,00	1,64	0,00
72 Kota Tual	11,52	0,00	13,02	3,08	76,87	1,40	0,56	0,00
Maluku	10,54	1,45	25,53	7,01	55,43	4,91	0,89	0,57

Tabel 3.5.C

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tempat Berobat Jalan							
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktik Batra/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	22,81	1,82	24,71	1,26	50,32	4,64	0,41	0,00
02 Maluku Tenggara	9,04	2,65	8,82	5,59	60,12	16,15	0,00	0,00
03 Maluku Tengah	15,45	0,68	37,44	5,97	39,68	3,64	1,16	2,41
04 Buru	10,07	0,50	41,53	13,39	25,64	12,30	1,04	0,36
05 Kepulauan Aru	12,46	0,18	22,24	2,28	62,48	2,23	0,28	0,16
06 Seram Bagian Barat	5,34	0,00	30,28	5,27	59,06	2,96	0,45	1,52
07 Seram Bagian Timur	2,43	0,00	10,10	2,20	85,41	2,80	3,03	2,40
08 Maluku Barat Daya	1,17	0,00	2,94	3,81	91,74	3,13	1,04	0,77
09 Buru Selatan	12,03	0,00	46,04	1,33	56,62	2,05	0,57	0,00
71 Kota Ambon	8,85	3,25	30,64	12,17	49,37	0,00	1,38	0,49
72 Kota Tual	11,72	0,62	12,20	3,00	75,65	1,62	0,31	0,51
Maluku	9,99	1,48	26,71	7,26	54,36	4,20	1,00	0,86

Tabel 3.6.A

Persentase Penduduk Laki-Laki yang Berobat Jalan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jaminan Kesehatan yang Digunakan										Penggunaan Jaminan Kesehatan	
	BPJS PBI		BPJS Non-PBI		Jamkesda		Asuransi Swasta		Jaminan Kesehatan Perusahaan/ Kantor		Ya	Tidak
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01 Kepulauan Tanimbar	33,71	66,29	17,09	82,91	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,80	49,20
02 Maluku Tenggara	48,16	51,84	10,25	89,75	13,00	87,00	0,00	100,00	0,00	100,00	71,42	28,58
03 Maluku Tengah	15,08	84,92	10,40	89,60	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	25,47	74,53
04 Buru	14,09	85,91	6,57	93,43	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20,66	79,34
05 Kepulauan Aru	28,41	71,59	16,86	83,14	14,87	85,13	0,00	100,00	0,00	100,00	58,35	41,65
06 Seram Bagian Barat	17,67	82,33	10,73	89,27	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	28,40	71,60
07 Seram Bagian Timur	26,79	73,21	5,72	94,28	3,90	96,10	0,00	100,00	0,00	100,00	36,41	63,59
08 Maluku Barat Daya	49,16	50,84	14,70	85,30	26,58	73,42	0,00	100,00	0,00	100,00	90,43	9,57
09 Buru Selatan	39,24	60,76	7,26	92,74	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46,50	53,50
71 Kota Ambon	12,92	87,08	29,85	70,15	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	42,78	57,22
72 Kota Tual	49,81	50,19	15,55	84,45	7,32	92,68	0,00	100,00	0,00	100,00	72,69	27,31
Maluku	23,29	76,71	17,16	82,84	3,33	96,67	0,00	100,00	0,00	100,00	43,70	56,30

Tabel 3.6.B

Persentase Penduduk Perempuan yang Berobat Jalan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jaminan Kesehatan yang Digunakan										Penggunaan Jaminan Kesehatan	
	BPJS PBI		BPJS Non-PBI		Jamkesda		Asuransi Swasta		Jaminan Kesehatan Perusahaan/ Kantor		Ya	Tidak
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01 Kepulauan Tanimbar	29,16	70,84	24,37	75,63	2,94	97,06	0,00	100,00	0,00	100,00	56,47	43,53
02 Maluku Tenggara	42,50	57,50	11,38	88,62	18,04	81,96	0,00	100,00	0,00	100,00	71,93	28,07
03 Maluku Tengah	16,19	83,81	16,91	83,09	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	33,10	66,90
04 Buru	12,67	87,33	9,01	90,99	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21,67	78,33
05 Kepulauan Aru	33,90	66,10	10,73	89,27	10,80	89,20	0,00	100,00	0,00	100,00	55,43	44,57
06 Seram Bagian Barat	16,58	83,42	12,49	87,51	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	29,07	70,93
07 Seram Bagian Timur	35,51	64,49	6,07	93,93	2,44	97,56	0,00	100,00	0,00	100,00	44,01	55,99
08 Maluku Barat Daya	50,67	49,33	5,65	94,35	31,04	68,96	0,00	100,00	0,00	100,00	87,36	12,64
09 Buru Selatan	37,35	62,65	5,41	94,59	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	42,77	57,23
71 Kota Ambon	16,71	83,29	37,32	62,68	1,46	98,54	0,00	100,00	0,00	100,00	55,49	44,51
72 Kota Tual	55,61	44,39	12,61	87,39	7,80	92,20	0,00	100,00	0,00	100,00	76,02	23,98
Maluku	26,68	73,32	18,60	81,40	5,31	94,69	0,00	100,00	0,00	100,00	50,59	49,41

Tabel 3.6.C

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jaminan Kesehatan yang Digunakan										Penggunaan Jaminan Kesehatan	
	BPJS PBI		BPJS Non-PBI		Jamkesda		Asuransi Swasta		Jaminan Kesehatan Perusahaan/ Kantor		Ya	Tidak
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01 Kepulauan Tanimbar	31,39	68,61	20,80	79,20	1,50	98,50	0,00	100,00	0,00	100,00	53,69	46,31
02 Maluku Tenggara	44,85	55,15	10,91	89,09	15,95	84,05	0,00	100,00	0,00	100,00	71,72	28,28
03 Maluku Tengah	15,63	84,37	13,62	86,38	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	29,24	70,76
04 Buru	13,35	86,65	7,83	92,17	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21,19	78,81
05 Kepulauan Aru	31,35	68,65	13,58	86,42	12,69	87,31	0,00	100,00	0,00	100,00	56,78	43,22
06 Seram Bagian Barat	17,10	82,90	11,65	88,35	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	28,75	71,25
07 Seram Bagian Timur	31,46	68,54	5,91	94,09	3,12	96,88	0,00	100,00	0,00	100,00	40,48	59,52
08 Maluku Barat Daya	50,04	49,96	9,44	90,56	29,17	70,83	0,00	100,00	0,00	100,00	88,65	11,35
09 Buru Selatan	38,33	61,67	6,37	93,63	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,70	55,30
71 Kota Ambon	14,61	85,39	33,19	66,81	0,65	99,35	0,00	100,00	0,00	100,00	48,46	51,54
72 Kota Tual	53,06	46,94	13,90	86,10	7,59	92,41	0,00	100,00	0,00	100,00	74,55	25,45
Maluku	25,01	74,99	17,89	82,11	4,33	95,67	0,00	100,00	0,00	100,00	47,19	52,81

Tabel 3.7.A

Persentase Penduduk Laki—Laki yang Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utamanya di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan								Total
	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transportasi	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Mengobati Sendiri	Tidak Ada yang Mendampingi	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kepulauan Tanimbar	2,40	11,70	0,00	0,00	55,05	0,00	26,06	4,79	100,00
02 Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	3,00	66,26	0,00	30,75	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	2,56	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00	12,69	2,21	100,00
04 Buru	2,71	0,00	0,69	0,24	53,47	0,00	42,90	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	0,00	2,98	3,89	0,00	38,03	0,00	53,93	1,17	100,00
06 Seram Bagian Barat	3,73	0,00	0,00	0,80	49,04	0,00	43,92	2,52	100,00
07 Seram Bagian Timur	7,22	0,00	1,28	0,84	68,37	0,00	21,18	1,10	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,00	3,60	1,35	0,69	53,79	0,94	36,84	2,80	100,00
09 Buru Selatan	0,78	0,00	0,00	0,00	69,11	0,00	26,15	3,96	100,00
71 Kota Ambon	2,79	0,00	0,00	0,38	45,12	1,33	47,41	2,97	100,00
72 Kota Tual	2,54	0,00	0,00	0,61	57,34	0,00	35,04	4,48	100,00
Maluku	2,94	0,94	0,42	0,40	58,87	0,37	33,76	2,30	100,00

Tabel 3.7.B

Persentase Penduduk Perempuan yang Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utamanya di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan								Total
	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transportasi	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Mengobati Sendiri	Tidak Ada yang Mendampingi	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kepulauan Tanimbar	2,58	19,99	0,00	0,33	51,26	1,89	22,14	1,81	100,00
02 Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	38,54	3,86	100,00
03 Maluku Tengah	1,12	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00	17,70	1,90	100,00
04 Buru	3,43	0,25	2,95	0,10	52,96	0,00	40,32	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	0,51	3,27	4,53	0,00	52,62	0,00	37,94	1,15	100,00
06 Seram Bagian Barat	2,86	0,33	0,00	0,00	49,26	0,00	45,37	2,19	100,00
07 Seram Bagian Timur	4,59	0,82	0,67	0,00	70,75	0,29	21,85	1,04	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,00	5,27	3,40	0,00	61,02	0,00	25,21	5,10	100,00
09 Buru Selatan	0,94	0,38	0,52	0,00	70,83	0,00	26,25	1,08	100,00
71 Kota Ambon	4,05	0,00	0,00	0,27	61,51	0,00	34,05	0,12	100,00
72 Kota Tual	4,71	0,57	0,00	0,00	65,36	0,00	25,32	4,04	100,00
Maluku	2,80	1,54	0,68	0,11	63,15	0,13	30,34	1,26	100,00

Tabel 3.7.C

Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utamanya di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan								Total
	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transportasi	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Mengobati Sendiri	Tidak Ada yang Mendampingi	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kepulauan Tanimbar	2,49	15,95	0,00	0,17	53,11	0,97	24,05	3,26	100,00
02 Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	1,29	61,32	0,00	35,19	2,20	100,00
03 Maluku Tengah	1,79	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	15,38	2,04	100,00
04 Buru	3,08	0,13	1,84	0,17	53,21	0,00	41,58	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	0,29	3,15	4,26	0,00	46,50	0,00	44,64	1,16	100,00
06 Seram Bagian Barat	3,26	0,18	0,00	0,37	49,16	0,00	44,70	2,34	100,00
07 Seram Bagian Timur	5,97	0,39	0,99	0,45	69,49	0,14	21,50	1,07	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,00	4,47	2,41	0,33	57,55	0,45	30,80	3,99	100,00
09 Buru Selatan	0,86	0,20	0,28	0,00	70,02	0,00	26,20	2,44	100,00
71 Kota Ambon	3,53	0,00	0,00	0,32	54,72	0,55	39,58	1,30	100,00
72 Kota Tual	3,67	0,30	0,00	0,29	61,50	0,00	29,99	4,25	100,00
Maluku	2,86	1,26	0,56	0,24	61,19	0,24	31,91	1,74	100,00

Tabel 3.8
Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Pernah Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	0,96	2,03	1,50
02 Maluku Tenggara	3,56	5,45	4,52
03 Maluku Tengah	1,70	2,82	2,26
04 Buru	1,30	2,33	1,80
05 Kepulauan Aru	1,26	2,57	1,89
06 Seram Bagian Barat	2,19	1,41	1,81
07 Seram Bagian Timur	1,60	0,81	1,21
08 Maluku Barat Daya	0,20	1,46	0,83
09 Buru Selatan	1,79	1,52	1,66
71 Kota Ambon	3,48	7,34	5,39
72 Kota Tual	2,28	3,99	3,14
Maluku	2,18	3,75	2,95

Tabel 3.9.A
Persentase Penduduk Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tempat Rawat Inap					
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	Praktik Batra/ Alternatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	97,80	2,60	0,00	0,00	2,20	0,00
02 Maluku Tenggara	78,15	18,26	1,40	2,19	0,00	0,00
03 Maluku Tengah	68,94	14,63	0,00	0,00	16,43	0,00
04 Buru	77,08	0,00	2,70	14,82	5,41	0,00
05 Kepulauan Aru	100,00	1,43	0,00	0,00	3,82	0,00
06 Seram Bagian Barat	72,37	2,14	0,00	0,00	25,49	0,00
07 Seram Bagian Timur	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
08 Maluku Barat Daya	54,24	0,00	0,00	0,00	45,76	0,00
09 Buru Selatan	95,40	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
71 Kota Ambon	50,90	43,35	0,00	6,74	0,00	0,00
72 Kota Tual	98,10	2,24	0,00	0,00	1,90	0,00
Maluku	66,88	22,72	0,25	3,75	7,14	0,00

Tabel 3.9.B

Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tempat Rawat Inap					
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	Praktik Batra/ Alternatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	88,68	1,24	0,00	0,00	11,32	0,00
02 Maluku Tenggara	68,34	30,91	0,00	0,00	2,28	0,00
03 Maluku Tengah	83,21	7,78	0,00	0,00	9,00	0,00
04 Buru	61,90	8,33	0,00	5,68	20,03	4,06
05 Kepulauan Aru	93,91	0,79	0,00	0,00	5,30	0,00
06 Seram Bagian Barat	72,32	1,39	0,00	0,00	26,29	0,00
07 Seram Bagian Timur	65,13	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00
08 Maluku Barat Daya	30,15	0,00	3,99	0,00	65,86	0,00
09 Buru Selatan	94,06	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00
71 Kota Ambon	62,36	33,34	0,00	3,15	1,78	1,63
72 Kota Tual	91,61	7,33	0,00	0,00	1,06	0,00
Maluku	69,78	21,88	0,06	1,91	6,67	1,04

Tabel 3.9.C
Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tempat Rawat Inap					
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik	Klinik/Praktik	Puskesmas/	Praktik Batra/
			Dokter/Bidan	Dokter Bersama	Pustu	Alternatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	91,62	1,68	0,00	0,00	8,38	0,00
02 Maluku Tenggara	72,13	26,02	0,54	0,85	1,40	0,00
03 Maluku Tengah	77,78	10,39	0,00	0,00	11,83	0,00
04 Buru	67,50	5,26	1,00	9,05	14,63	2,56
05 Kepulauan Aru	96,00	1,01	0,00	0,00	4,79	0,00
06 Seram Bagian Barat	72,35	1,85	0,00	0,00	25,80	0,00
07 Seram Bagian Timur	71,76	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00
08 Maluku Barat Daya	33,10	0,00	3,50	0,00	63,40	0,00
09 Buru Selatan	94,80	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
71 Kota Ambon	58,61	36,61	0,00	4,32	1,20	1,10
72 Kota Tual	93,94	5,50	0,00	0,00	1,36	0,00
Maluku	68,70	22,19	0,13	2,59	6,84	0,65

Tabel 3.10.A

Persentase Penduduk Laki—Laki yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Dirawat (hari) di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Lamanya Rawat Inap				Total	Rata-Rata Lama Dirawat Inap
	1—3	4—6	7—29	30 +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	41,85	37,69	15,26	5,20	100,00	6,53
02 Maluku Tenggara	32,71	24,22	39,26	3,81	100,00	7,95
03 Maluku Tengah	43,30	16,06	40,64	0,00	100,00	4,57
04 Buru	39,16	13,75	28,48	18,60	100,00	15,35
05 Kepulauan Aru	21,77	25,35	46,54	6,34	100,00	7,86
06 Seram Bagian Barat	47,91	26,64	21,80	3,66	100,00	6,63
07 Seram Bagian Timur	38,89	14,43	43,02	3,66	100,00	7,28
08 Maluku Barat Daya	80,52	0,00	19,48	0,00	100,00	2,71
09 Buru Selatan	29,02	27,96	38,03	5,00	100,00	8,14
71 Kota Ambon	27,89	48,02	24,09	0,00	100,00	5,41
72 Kota Tual	27,21	20,75	48,90	3,14	100,00	6,53
Maluku	34,21	32,50	30,91	2,38	100,00	6,41

Tabel 3.10.B

Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Dirawat (hari) di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Lamanya Rawat Inap				Total	Rata-Rata Lama Dirawat Inap
	1—3	4—6	7—29	30 +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	50,67	14,14	35,18	0,00	100,00	6,11
02 Maluku Tenggara	41,90	12,03	46,08	0,00	100,00	6,23
03 Maluku Tengah	35,73	36,91	23,37	3,98	100,00	6,03
04 Buru	57,54	26,53	4,99	10,94	100,00	6,23
05 Kepulauan Aru	38,57	20,83	40,60	0,00	100,00	5,13
06 Seram Bagian Barat	46,39	19,01	34,60	0,00	100,00	5,46
07 Seram Bagian Timur	41,28	42,06	16,67	0,00	100,00	3,89
08 Maluku Barat Daya	45,52	19,39	29,83	5,26	100,00	9,43
09 Buru Selatan	57,25	16,34	26,41	0,00	100,00	4,23
71 Kota Ambon	47,62	23,48	28,17	0,73	100,00	4,97
72 Kota Tual	35,17	35,18	27,31	2,34	100,00	5,43
Maluku	44,95	24,82	28,50	1,73	100,00	5,43

Tabel 3.10.C

Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Dirawat (hari) di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Lamanya Rawat Inap				Total	Rata-Rata Lama Dirawat Inap
	1—3	4—6	7—29	30 +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	47,83	21,73	28,76	1,68	100,00	6,24
02 Maluku Tenggara	38,34	16,74	43,44	1,47	100,00	6,89
03 Maluku Tengah	38,61	28,97	29,95	2,47	100,00	5,47
04 Buru	50,76	21,81	13,66	13,77	100,00	9,59
05 Kepulauan Aru	32,79	22,38	42,65	2,18	100,00	6,07
06 Seram Bagian Barat	47,33	23,73	26,68	2,26	100,00	6,18
07 Seram Bagian Timur	39,68	23,50	34,37	2,46	100,00	6,17
08 Maluku Barat Daya	49,81	17,02	28,56	4,62	100,00	8,60
09 Buru Selatan	41,63	22,77	32,84	2,76	100,00	6,39
71 Kota Ambon	41,17	31,49	26,84	0,49	100,00	5,11
72 Kota Tual	32,32	30,00	35,06	2,63	100,00	5,82
Maluku	40,95	27,68	29,40	1,97	100,00	5,79

Tabel 3.11

Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dan Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	82,82	54,62	63,70
02 Maluku Tenggara	71,13	88,29	81,65
03 Maluku Tengah	47,64	65,41	58,64
04 Buru	54,70	49,77	51,59
05 Kepulauan Aru	69,64	64,53	66,29
06 Seram Bagian Barat	66,01	88,80	74,71
07 Seram Bagian Timur	46,80	74,91	56,03
08 Maluku Barat Daya	100,00	90,79	91,92
09 Buru Selatan	68,63	82,46	74,81
71 Kota Ambon	57,96	76,79	70,64
72 Kota Tual	91,07	80,58	84,35
Maluku	60,49	74,33	69,17

BAB IV

PENDIDIKAN

<https://idku.bps.go.id>

4.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan berbagai konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Angka Buta Huruf** didefinisikan sebagai proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang tidak dapat membaca dan menulis.
2. **Tidak/belum pernah bersekolah** didefinisikan sebagai anggota ruta berumur lima tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
3. **Pendidikan formal** didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi.
4. **Pendidikan nonformal** didefinisikan sebagai jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, B, C), serta pendidikan lainnya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
5. **Masih bersekolah** didefinisikan sebagai anggota ruta berumur lima tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
6. **Tidak bersekolah lagi** didefinisikan sebagai anggota ruta berumur lima tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
7. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** didefinisikan sebagai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.
8. **Tamat sekolah** didefinisikan sebagai menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang

pendidikan formal dan nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah, Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah.

9. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
10. **Angka Partisipasi Murni (APM)** didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
11. **Pendidikan prasekolah** didefinisikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

4.2 Ulasan Singkat

Mencerdaskan kehidupan bangsa secara tegas dan jelas ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai salah satu tujuan bernegara kita. Pendidikan merupakan salah satu cara utama dalam upaya untuk mencapai cita-cita tersebut. Sejak awal negara ini memikirkan kemerdekaannya, lembaga dan orang-orang terdidik selalu menjadi garda terdepan dan utama dalam merumuskan nasib bangsa Indonesia. Budi Utomo yang didirikan pada 1908 merupakan salah satu bukti pergerakan oleh para terdidik untuk memerdekakan bangsanya. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan para terdidik belum selesai dan justru lebih relevan lagi, utamanya dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan budi pekerti, agar lebih banyak lagi orang yang mampu mengenyam dan menikmati pendidikan sehingga memiliki kemampuan untuk memperbaiki nasib diri dan bangsanya.

Pembangunan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam proses pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan perlu terus diupayakan karena peranan pendidikan sangat strategis. Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD

1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Gambaran keadaan pendidikan di Provinsi Maluku akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni Tingkat Partisipasi Sekolah yang meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), serta Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenjang Pendidikan, dan Partisipasi Sekolah Anak Usia Pra-Sekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

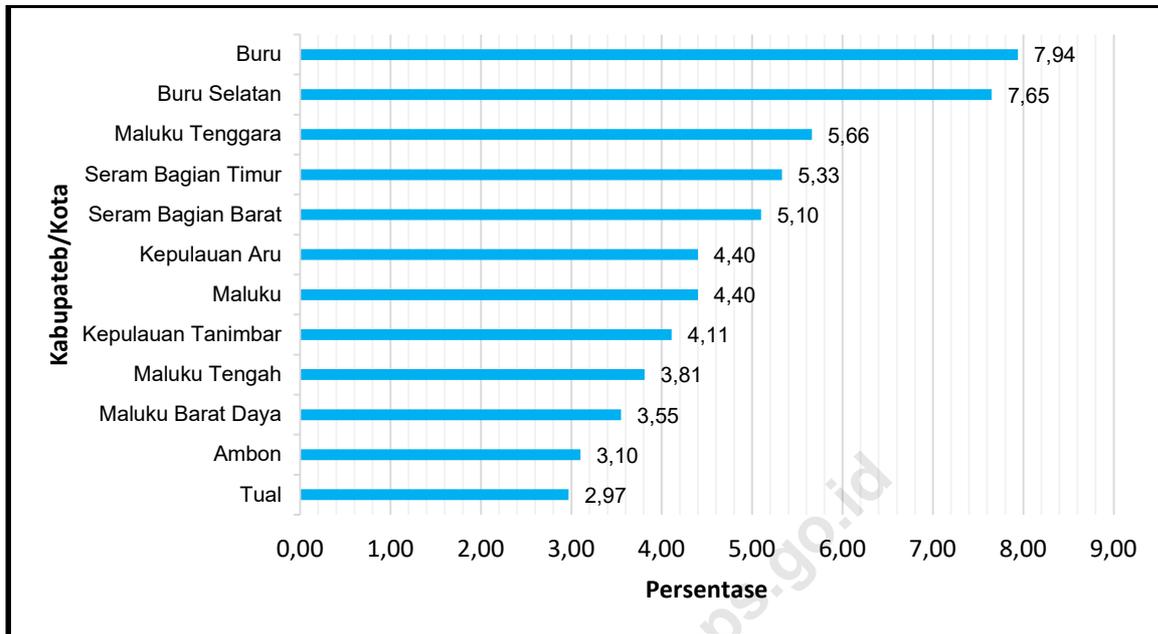
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Susenas tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase anak berumur 0—6 tahun yang pernah/masih mengikuti pendidikan prasekolah di Provinsi Maluku mencapai 17,44 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase anak laki-laki berumur 0—6 tahun yang pernah/masih mengikuti pendidikan prasekolah hampir sama (17,38 persen) dengan anak perempuan (17,49 persen). Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Buru Selatan merupakan kabupaten/kota dengan catatan persentase tertinggi, masing-masing sebesar 33,98 persen dan 26,82 persen. Sementara itu, Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki persentase paling rendah, tercatat sebesar 10,66 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.A hingga Tabel 4.3.C.

Partisipasi sekolah penduduk disajikan berdasarkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tercatat tidak/belum pernah sekolah di Maluku sebesar 4,40 persen, persentase tertinggi di Kabupaten Buru (7,94 persen) dan terendah di Kota Tual yaitu sebesar 2,97 persen (Gambar 4.1). Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 4,53 persen dibanding 4,27 persen (Tabel 4.5.A dan Tabel 4.5.B). Pada Tabel 4.5.C juga terlihat penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi, persentase penduduk yang masih bersekolah sebesar 33,57 persen dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 62,03 persen.

Gambar 4.1

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

Secara umum persentase penduduk berumur 7—24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar 0,41 persen, masih sekolah sebesar 77,50 persen, dan tidak bersekolah lagi sebesar 22,08 persen (Tabel 4.1). Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan berumur 7—24 tahun yang masih bersekolah lebih besar dibanding penduduk laki-laki, yaitu 79,06 persen berbanding 76,04 persen. Demikian sebaliknya, persentase penduduk laki-laki berumur 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi lebih tinggi dibanding penduduk perempuan yaitu masing-masing sebesar 23,44 persen dan 20,64 persen.

Partisipasi penduduk bersekolah menurut usia sekolah dari jenjang pendidikan SD sampai Universitas (7—24 tahun) secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.6.A hingga Tabel 4.6.C.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019

Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah				Jumlah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
		SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laki – Laki	0,51	35,21	16,16	14,31	10,37	76,04	23,44	100,00
Perempuan	0,30	36,54	16,21	15,40	10,91	79,06	20,64	100,00
Laki-Laki + Perempuan	0,41	35,86	16,18	14,84	10,63	77,50	22,08	100,00

Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

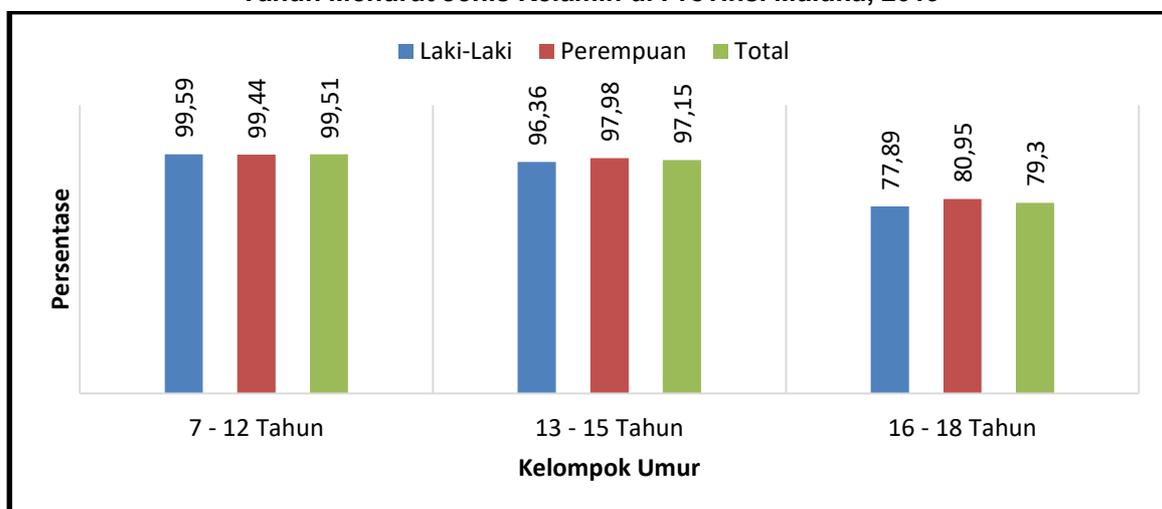
Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7—12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13—15 tahun untuk tingkat pendidikan SLTP, dan kelompok ketiga umur 16—18 tahun untuk tingkat pendidikan SLTA. Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa cukup banyak penduduk berumur 5—6 tahun telah memasuki pendidikan dasar, sehingga dalam publikasi ini ditampilkan pula APS untuk kelompok umur 5—6 tahun.

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa APS SD (umur 7-12 tahun) mendekati 100 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7—12 tahun di Maluku sedang mengikuti pendidikan. Sementara pada jenjang pendidikan SMP (umur 13—15 tahun) baru mencapai 97,15 persen. Lain halnya pada jenjang pendidikan SMA (16—18 tahun), angka APS baru tercatat mencapai 79,30 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, semakin tinggi kelompok umur akan semakin rendah APS, baik laki-laki maupun perempuan.

APS kelompok umur 5—6 tahun di Provinsi Maluku tercatat sebesar 35,69 persen. Artinya hampir 40 persen penduduk Maluku berusia 5—6 tahun sudah bersekolah pada jenjang pendidikan dasar. APS kelompok umur 5—6 tahun penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 34,03 persen berbanding 37,12 persen. Data APS selengkapnya disajikan pada Tabel 4.7.A hingga Tabel 4.7.C.

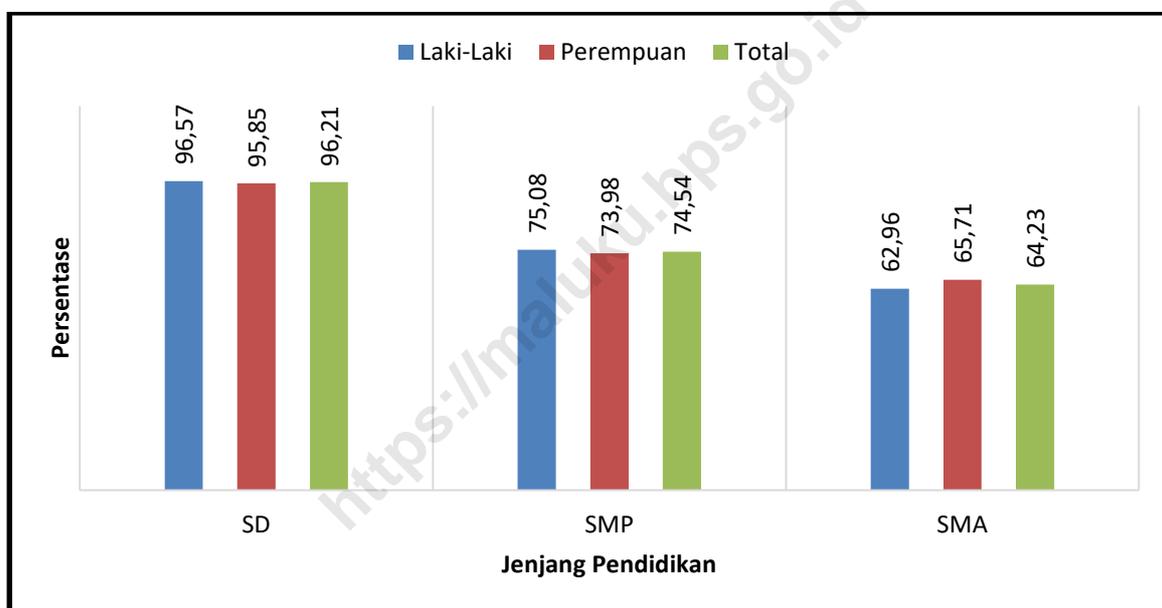
Gambar 4.2
Angka Pasrtisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 – 12 Tahun, 13 – 15 Tahun, dan 16 – 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

Seperti halnya APS, Angka Partisipasi Murni (APM) juga disajikan pada ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Tidak jauh berbeda dengan APS, APM juga cenderung tercatat mengalami penurunan seiring tingginya tingkat pendidikan, seperti terlihat pada Gambar 4.3. Angka Partisipasi Murni ini menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Di samping itu, APM juga dapat digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Data APM selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.8.A hingga Tabel 4.8.C.

Gambar 4.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu daerah maka akan semakin tinggi pula taraf intelektualitas daerah tersebut. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah tercatat sebesar 9,86 persen, tamat SD sederajat 19,79 persen, tamat SMP sederajat 21,88 persen, tamat SMA sederajat 35,86 persen, tamat Diploma I – Diploma III 2,73 persen, Diploma IV sampai dengan S3 sebesar 9,83 persen, dan profesi 0.05 persen.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Jenis Kelamin	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki							Jumlah
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	D-I/ D-II/ D-III	Diploma IV/S1/S2/S3	Profesi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laki-Laki	8,89	19,24	22,00	39,03	1,86	8,95	0,02	100,00
Perempuan	10,84	20,33	21,76	32,66	3,61	10,73	0,07	100,00
Laki-Laki + Perempuan	9,86	19,79	21,88	35,86	2,73	9,83	0,05	100,00

Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

<https://maluku.bps.go.id>

Tabel 4.3.A

Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0 – 6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah				Jumlah
	Masih/Pernah Mengikuti Prasekolah Tahun Ajaran Ini	Pernah Mengikuti Prasekolah TA Ini	Pernah Mengikuti Prasekolah Sebelum TA 2018/2019	Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	25,16	1,01	10,98	62,85	100,00
02 Maluku Tenggara	31,49	1,28	7,52	59,71	100,00
03 Maluku Tengah	16,00	1,21	6,37	76,42	100,00
04 Buru	17,11	0,18	4,80	77,91	100,00
05 Kepulauan Aru	14,18	0,00	3,93	81,89	100,00
06 Seram Bagian Barat	12,51	0,00	7,35	80,14	100,00
07 Seram Bagian Timur	18,97	0,00	3,65	77,38	100,00
08 Maluku Barat Daya	26,82	0,86	9,15	63,17	100,00
09 Buru Selatan	25,22	0,97	7,05	66,76	100,00
71 Kota Ambon	9,18	0,83	8,00	81,99	100,00
72 Kota Tual	13,36	0,76	10,17	75,71	100,00
Maluku	16,67	0,71	7,08	75,53	100,00

Tabel 4.3.B

Persentase Anak Perempuan Berumur 0 – 6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah				Jumlah
	Masih/Pernah Mengikuti Prasekolah Tahun Ajaran Ini	Pernah Mengikuti Prasekolah TA Ini	Pernah Mengikuti Prasekolah Sebelum TA 2018/2019	Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	20,57	0,00	6,72	72,70	100,00
02 Maluku Tenggara	34,23	0,97	5,68	59,12	100,00
03 Maluku Tengah	14,91	0,44	6,40	78,25	100,00
04 Buru	23,73	0,00	4,10	72,17	100,00
05 Kepulauan Aru	18,18	0,19	4,67	76,96	100,00
06 Seram Bagian Barat	8,81	0,00	6,63	84,56	100,00
07 Seram Bagian Timur	15,03	0,30	2,35	82,33	100,00
08 Maluku Barat Daya	24,44	0,52	10,21	64,82	100,00
09 Buru Selatan	26,87	0,66	8,59	63,87	100,00
71 Kota Ambon	12,52	0,00	4,04	83,44	100,00
72 Kota Tual	14,50	0,00	6,79	78,71	100,00
Maluku	17,26	0,23	5,61	76,90	100,00

Tabel 4.3.C

Persentase Anak Berumur 0 – 6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah				Jumlah
	Masih/Pernah Mengikuti Prasekolah Tahun Ajaran Ini	Pernah Mengikuti Prasekolah TA Ini	Pernah Mengikuti PraSekolah Sebelum TA 2018/2019	Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	22,94	0,52	8,92	67,62	100,00
02 Maluku Tenggara	32,85	1,13	6,61	59,42	100,00
03 Maluku Tengah	15,48	0,84	6,39	77,29	100,00
04 Buru	20,37	0,09	4,46	75,08	100,00
05 Kepulauan Aru	16,17	0,09	4,30	79,44	100,00
06 Seram Bagian Barat	10,66	0,00	6,99	82,35	100,00
07 Seram Bagian Timur	17,04	0,15	3,01	79,80	100,00
08 Maluku Barat Daya	25,67	0,70	9,66	63,96	100,00
09 Buru Selatan	26,00	0,82	7,78	65,40	100,00
71 Kota Ambon	10,72	0,45	6,17	82,66	100,00
72 Kota Tual	13,92	0,39	8,50	77,19	100,00
Maluku	16,96	0,48	6,37	76,19	100,00

Tabel 4.4.A

Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0 – 6 Tahun Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Prasekolah di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Pendidikan Prasekolah					Jumlah
	Taman Kanak-Kanak	Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal	PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/ Taman Posyandu, dll	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	67,71	0,92	27,24	4,13	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	18,96	4,63	76,41	0,00	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	67,29	0,00	31,26	1,45	0,00	100,00
04 Buru	55,50	0,00	44,50	0,00	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	48,81	7,14	41,83	2,22	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	62,28	7,00	30,72	0,00	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	49,30	0,00	47,28	3,42	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	57,86	0,00	41,27	0,88	0,00	100,00
09 Buru Selatan	58,15	2,59	36,90	2,36	0,00	100,00
71 Kota Ambon	80,24	0,00	17,89	1,87	0,00	100,00
72 Kota Tual	45,34	0,92	51,83	1,92	0,00	100,00
Maluku	59,37	1,62	37,38	1,63	0,00	100,00

Tabel 4.4.B

Persentase Anak Perempuan Berumur 0 – 6 Tahun Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Prasekolah di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Pendidikan Prasekolah					Jumlah
	Taman Kanak-Kanak	Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal	PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/ Taman Posyandu, dll	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	68,71	3,46	23,18	4,66	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	19,14	0,00	80,86	0,00	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	58,49	0,00	38,00	0,95	2,56	100,00
04 Buru	64,87	0,00	35,13	0,00	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	20,91	0,08	74,59	4,42	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	54,14	0,00	45,86	0,00	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	54,95	0,00	42,06	2,99	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	47,76	0,00	52,24	0,00	0,00	100,00
09 Buru Selatan	51,37	1,39	47,24	0,00	0,00	100,00
71 Kota Ambon	74,11	0,00	21,88	4,01	0,00	100,00
72 Kota Tual	45,90	0,00	53,56	0,00	0,54	100,00
Maluku	53,40	0,39	44,09	1,60	0,52	100,00

Tabel 4.4.C

Persentase Anak Berumur 0 – 6 Tahun Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Prasekolah di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Pendidikan Prasekolah					Jumlah
	Taman Kanak-Kanak	Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal	PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/ Taman Posyandu, dll	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	68,12	1,96	25,58	4,35	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	19,05	2,32	78,63	0,00	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	63,26	0,00	34,35	1,22	1,17	100,00
04 Buru	60,65	0,00	39,35	0,00	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	33,28	3,21	60,07	3,45	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	58,72	3,94	37,34	0,00	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	51,71	0,00	45,05	3,24	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	53,11	0,00	46,42	0,47	0,00	100,00
09 Buru Selatan	54,81	2,00	41,99	1,20	0,00	100,00
71 Kota Ambon	77,54	0,00	19,65	2,82	0,00	100,00
72 Kota Tual	45,60	0,49	52,62	1,04	0,25	100,00
Maluku	56,58	1,04	40,52	1,62	0,24	100,00

Tabel 4.5.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum	Masih Sekolah				Jumlah	Tidak	Total
	Pernah Sekolah	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas		Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	4,31	17,77	6,27	4,22	1,66	29,92	65,76	100,00
02 Maluku Tenggara	4,70	18,46	5,69	5,71	1,81	31,68	63,62	100,00
03 Maluku Tengah	4,32	15,98	7,84	5,78	3,89	33,50	62,18	100,00
04 Buru	6,55	18,01	5,38	5,12	2,69	31,19	62,26	100,00
05 Kepulauan Aru	3,86	17,80	5,66	5,81	1,60	30,88	65,27	100,00
06 Seram Bagian Barat	5,02	20,42	6,21	5,22	3,00	34,84	60,14	100,00
07 Seram Bagian Timur	4,64	18,33	7,04	6,09	1,85	33,30	62,06	100,00
08 Maluku Barat Daya	4,33	17,55	7,03	4,90	1,27	30,75	64,93	100,00
09 Buru Selatan	7,16	20,19	8,03	6,17	1,06	35,45	57,39	100,00
71 Kota Ambon	3,00	12,59	6,23	6,27	10,86	35,94	61,06	100,00
72 Kota Tual	2,90	18,91	6,93	9,42	3,30	38,56	58,54	100,00
Maluku	4,27	16,46	6,61	5,85	4,87	33,80	61,94	100,00

Tabel 4.5.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum	Masih Sekolah				Jumlah	Tidak	Total
	Pernah Sekolah	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas		Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	3,91	17,71	5,64	4,33	1,45	29,13	66,96	100,00
02 Maluku Tenggara	6,58	15,51	5,42	5,50	3,07	29,50	63,92	100,00
03 Maluku Tengah	3,30	15,46	7,37	4,92	5,11	32,86	63,84	100,00
04 Buru	9,40	17,11	5,28	7,42	3,77	33,58	57,03	100,00
05 Kepulauan Aru	4,98	17,63	5,86	6,30	1,65	31,45	63,57	100,00
06 Seram Bagian Barat	5,18	19,28	7,19	6,07	3,42	35,96	58,86	100,00
07 Seram Bagian Timur	6,04	18,76	6,82	5,20	2,17	32,95	61,01	100,00
08 Maluku Barat Daya	2,78	19,22	5,68	5,80	0,90	31,60	65,63	100,00
09 Buru Selatan	8,16	19,81	7,88	6,75	1,90	36,34	55,49	100,00
71 Kota Ambon	3,19	12,67	5,80	6,84	9,28	34,60	62,21	100,00
72 Kota Tual	3,04	16,77	6,86	7,80	3,48	34,92	62,04	100,00
Maluku	4,53	16,00	6,36	6,05	4,93	33,34	62,13	100,00

Tabel 4.5.C

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum	Masih Sekolah				Jumlah	Tidak	Total
	Pernah Sekolah	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas		Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	4,11	17,74	5,95	4,27	1,56	29,53	66,36	100,00
02 Maluku Tenggara	5,66	16,95	5,55	5,61	2,46	30,57	63,77	100,00
03 Maluku Tengah	3,81	15,72	7,61	5,36	4,49	33,18	63,00	100,00
04 Buru	7,94	17,57	5,33	6,24	3,21	32,36	59,70	100,00
05 Kepulauan Aru	4,40	17,72	5,76	6,05	1,63	31,15	64,45	100,00
06 Seram Bagian Barat	5,10	19,86	6,69	5,63	3,20	35,39	59,52	100,00
07 Seram Bagian Timur	5,33	18,54	6,93	5,65	2,01	33,13	61,54	100,00
08 Maluku Barat Daya	3,55	18,38	6,36	5,35	1,09	31,17	65,28	100,00
09 Buru Selatan	7,65	20,01	7,96	6,45	1,47	35,88	56,47	100,00
71 Kota Ambon	3,10	12,63	6,02	6,55	10,08	35,27	61,63	100,00
72 Kota Tual	2,97	17,82	6,90	8,60	3,39	36,72	60,32	100,00
Maluku	4,40	16,23	6,49	5,95	4,90	33,57	62,03	100,00

Tabel 4.6.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum	Masih Sekolah				Jumlah	Tidak	Total
	Pernah Sekolah	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas		Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	0,40	40,15	16,32	10,99	3,13	70,58	29,02	100,00
02 Maluku Tenggara	0,53	39,97	13,90	13,95	2,87	70,70	28,77	100,00
03 Maluku Tengah	0,36	35,36	19,72	14,54	9,30	78,91	20,73	100,00
04 Buru	1,73	40,56	13,30	12,66	5,93	72,46	25,81	100,00
05 Kepulauan Aru	0,67	39,76	13,87	14,24	2,87	70,74	28,59	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,20	42,89	14,34	12,07	5,95	75,24	24,56	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,21	40,94	17,09	14,79	3,34	76,16	23,64	100,00
08 Maluku Barat Daya	1,02	39,72	18,47	12,88	1,83	72,90	26,09	100,00
09 Buru Selatan	1,33	40,84	18,59	14,29	1,67	75,39	23,28	100,00
71 Kota Ambon	0,31	24,83	15,11	15,21	23,26	78,41	21,28	100,00
72 Kota Tual	0,32	37,21	15,53	21,11	5,59	79,43	20,25	100,00
Maluku	0,51	35,21	16,16	14,31	10,37	76,04	23,44	100,00

Tabel 4.6.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum	Masih Sekolah				Jumlah	Tidak	Total
	Pernah Sekolah	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas		Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	0,36	42,64	15,07	11,56	2,58	71,85	27,80	100,00
02 Maluku Tenggara	0,57	39,61	15,11	15,33	6,35	76,40	23,03	100,00
03 Maluku Tengah	0,00	35,37	19,50	13,03	11,00	78,90	21,10	100,00
04 Buru	0,54	39,66	12,99	18,27	8,10	79,02	20,44	100,00
05 Kepulauan Aru	1,00	39,94	14,77	15,88	2,90	73,48	25,52	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,01	41,28	17,54	14,79	6,71	80,33	19,67	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,44	43,03	16,54	12,60	4,40	76,58	22,98	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,00	45,67	15,38	15,68	0,78	77,52	22,48	100,00
09 Buru Selatan	1,00	42,05	18,71	16,03	2,07	78,86	20,14	100,00
71 Kota Ambon	0,20	29,22	14,66	17,29	21,97	83,13	16,67	100,00
72 Kota Tual	0,86	33,52	16,35	18,59	7,78	76,25	22,90	100,00
Maluku	0,30	36,54	16,21	15,40	10,91	79,06	20,64	100,00

Tabel 4.6.C

Persentase Penduduk Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum	Masih Sekolah				Jumlah	Tidak	Total
	Pernah Sekolah	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas		Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	0,38	41,37	15,70	11,27	2,86	71,20	28,42	100,00
02 Maluku Tenggara	0,55	39,80	14,48	14,61	4,54	73,43	26,02	100,00
03 Maluku Tengah	0,19	35,36	19,62	13,81	10,12	78,91	20,91	100,00
04 Buru	1,15	40,12	13,15	15,41	6,99	75,67	23,18	100,00
05 Kepulauan Aru	0,83	39,85	14,30	15,02	2,89	72,05	27,13	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,11	42,13	15,85	13,36	6,31	77,65	22,24	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,32	41,96	16,82	13,71	3,86	76,36	23,31	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,52	42,64	16,95	14,26	1,31	75,17	24,31	100,00
09 Buru Selatan	1,17	41,43	18,65	15,13	1,86	77,07	21,77	100,00
71 Kota Ambon	0,26	26,96	14,89	16,22	22,63	80,71	19,04	100,00
72 Kota Tual	0,58	35,40	15,93	19,87	6,67	77,87	21,55	100,00
Maluku	0,41	35,86	16,18	14,84	10,63	77,50	22,08	100,00

Tabel 4.7.A

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Laki-Laki Berumur 5 – 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	5 – 6	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	33,54	99,97	89,78	61,18
02 Maluku Tenggara	36,66	99,36	98,27	68,87
03 Maluku Tengah	33,05	100,00	98,03	80,62
04 Buru	30,93	99,28	93,62	71,53
05 Kepulauan Aru	34,48	100,00	92,71	67,71
06 Seram Bagian Barat	29,32	99,93	96,75	78,41
07 Seram Bagian Timur	27,80	99,56	96,40	84,66
08 Maluku Barat Daya	39,46	98,30	94,30	61,61
09 Buru Selatan	40,62	98,62	92,76	76,92
71 Kota Ambon	47,36	99,38	98,12	83,63
72 Kota Tual	50,09	99,69	99,54	86,91
Maluku	37,12	99,59	96,36	77,89

Tabel 4.7.B

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Perempuan Berumur 5 – 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	5 – 6	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	33,47	99,46	90,28	69,42
02 Maluku Tenggara	21,51	100,00	95,52	80,05
03 Maluku Tengah	43,24	99,79	100,00	84,17
04 Buru	18,97	100,00	98,38	71,89
05 Kepulauan Aru	32,62	99,04	92,60	75,23
06 Seram Bagian Barat	38,16	98,79	99,97	87,93
07 Seram Bagian Timur	21,56	99,72	98,48	77,71
08 Maluku Barat Daya	46,81	100,00	91,63	76,86
09 Buru Selatan	39,05	98,03	98,35	77,28
71 Kota Ambon	29,04	99,18	100,00	84,57
72 Kota Tual	59,20	99,86	96,28	83,48
Maluku	34,03	99,44	97,98	80,95

Tabel 4.7.C

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5 – 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	5 – 6	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	33,51	99,71	89,99	65,40
02 Maluku Tenggara	28,73	99,67	96,86	73,35
03 Maluku Tengah	37,64	99,89	98,97	82,27
04 Buru	25,02	99,63	96,00	71,70
05 Kepulauan Aru	33,50	99,53	92,66	71,11
06 Seram Bagian Barat	33,43	99,39	98,35	83,01
07 Seram Bagian Timur	24,92	99,64	97,42	81,60
08 Maluku Barat Daya	42,73	99,19	93,04	68,27
09 Buru Selatan	39,92	98,32	95,31	77,11
71 Kota Ambon	39,47	99,27	99,05	84,05
72 Kota Tual	54,71	99,77	97,96	85,29
Maluku	35,69	99,51	97,15	79,30

Tabel 4.8.A

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Laki-Laki Berumur 7—18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	98,08	64,40	44,04
02 Maluku Tenggara	98,59	73,82	61,38
03 Maluku Tengah	96,20	78,38	58,28
04 Buru	98,33	71,88	60,35
05 Kepulauan Aru	98,70	68,04	54,33
06 Seram Bagian Barat	99,11	70,95	67,05
07 Seram Bagian Timur	98,03	71,84	69,21
08 Maluku Barat Daya	98,30	79,40	48,33
09 Buru Selatan	98,62	73,03	62,52
71 Kota Ambon	91,39	82,68	70,23
72 Kota Tual	99,16	65,33	73,57
Maluku	96,57	75,08	62,96

Tabel 4.8.B

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Perempuan Berumur 7—18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	98,69	81,99	55,33
02 Maluku Tenggara	99,19	66,22	65,11
03 Maluku Tengah	96,61	84,30	60,51
04 Buru	99,15	70,64	67,30
05 Kepulauan Aru	96,44	60,30	63,26
06 Seram Bagian Barat	97,45	73,55	68,81
07 Seram Bagian Timur	99,72	71,30	53,88
08 Maluku Barat Daya	99,49	67,94	60,18
09 Buru Selatan	97,60	83,40	69,21
71 Kota Ambon	88,98	69,69	74,08
72 Kota Tual	98,45	74,05	65,72
Maluku	95,85	73,98	65,71

Tabel 4.8.C

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7—18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	98,39	71,89	49,83
02 Maluku Tenggara	98,88	69,93	62,87
03 Maluku Tengah	96,40	81,18	59,32
04 Buru	98,73	71,26	63,69
05 Kepulauan Aru	97,60	64,02	58,37
06 Seram Bagian Barat	98,33	72,25	67,90
07 Seram Bagian Timur	98,88	71,58	62,45
08 Maluku Barat Daya	98,93	73,99	53,50
09 Buru Selatan	98,11	77,77	66,08
71 Kota Ambon	90,11	76,21	71,96
72 Kota Tual	98,82	69,56	69,86
Maluku	96,21	74,54	64,23

Tabel 4.9.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki							Jumlah
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	D-I/ D-II/ D-III	Diploma IV/ S1/S2/S3	Profesi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	5,78	25,77	20,61	37,72	1,49	8,29	0,34	100,00
02 Maluku Tenggara	11,74	19,12	22,88	35,29	2,18	8,79	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	10,03	21,79	23,86	36,05	1,53	6,75	0,00	100,00
04 Buru	13,14	21,48	22,73	34,51	1,76	6,38	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	10,83	33,41	20,88	28,79	1,34	4,74	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	11,57	24,38	22,80	33,85	0,73	6,66	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	14,52	26,12	22,16	27,29	1,36	8,56	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	10,21	36,86	22,82	23,62	1,66	4,82	0,00	100,00
09 Buru Selatan	14,51	25,39	22,89	29,18	0,77	7,26	0,00	100,00
71 Kota Ambon	4,39	6,98	19,96	52,73	2,63	13,30	0,00	100,00
72 Kota Tual	4,66	16,29	24,28	38,84	3,56	12,30	0,07	100,00
Maluku	8,89	19,24	22,00	39,03	1,86	8,95	0,02	100,00

Tabel 4.9.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki							Jumlah
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	D-I/ D-II/ D-III	Diploma IV/ S1/S2/S3	Profesi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	7,61	25,70	23,64	32,10	1,61	9,34	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	14,88	23,36	20,26	29,40	3,00	9,10	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	10,27	21,27	23,29	31,46	3,73	9,94	0,05	100,00
04 Buru	17,68	22,48	24,85	24,41	4,10	6,48	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	11,49	33,98	21,66	23,48	1,88	7,51	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	14,40	25,10	20,72	29,32	1,68	8,79	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	19,12	28,33	20,85	20,38	2,28	9,05	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	11,06	37,68	23,62	20,83	2,10	4,71	0,00	100,00
09 Buru Selatan	22,98	24,30	19,86	22,83	2,15	7,88	0,00	100,00
71 Kota Ambon	5,69	8,34	20,51	44,25	5,09	15,92	0,20	100,00
72 Kota Tual	6,28	24,32	19,49	34,00	6,43	9,47	0,00	100,00
Maluku	10,84	20,33	21,76	32,66	3,61	10,73	0,07	100,00

Tabel 4.9.C

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki							Jumlah
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	D-I/ D-II/ D-III	Diploma IV/ S1/S2/S3	Profesi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	6,70	25,74	22,14	34,89	1,55	8,82	0,17	100,00
02 Maluku Tenggara	13,38	21,33	21,51	32,22	2,61	8,95	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	10,15	21,53	23,58	33,76	2,63	8,34	0,02	100,00
04 Buru	15,36	21,97	23,77	29,56	2,91	6,43	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	11,15	33,69	21,25	26,25	1,59	6,07	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	12,96	24,73	21,77	31,61	1,20	7,71	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	16,78	27,20	21,51	23,89	1,81	8,80	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	10,64	37,28	23,22	22,22	1,88	4,76	0,00	100,00
09 Buru Selatan	18,65	24,86	21,41	26,08	1,45	7,56	0,00	100,00
71 Kota Ambon	5,03	7,66	20,24	48,51	3,85	14,61	0,10	100,00
72 Kota Tual	5,49	20,41	21,82	36,36	5,04	10,85	0,03	100,00
Maluku	9,86	19,79	21,88	35,86	2,73	9,83	0,05	100,00

BAB V

FERTILITAS

DAN

KELUARGA

BERENCANA

5.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan berbagai konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Fertilitas** didefinisikan sebagai banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita.
2. **Keluarga Berencana** didefinisikan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3. **Sterilisasi wanita/tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW)** didefinisikan sebagai tindakan operasi menyumbat (mengikat dan atau memotong) saluran keluar ovum, yakni tuba, sehingga perjalanan ovum dari ovarium saat ovulasi tidak sampai ke tempat pembuahan di uterus. Dengan demikian, kehadiran sperma tidak mengakibatkan konsepsi, dan tidak terjadi kehamilan.
4. **Seterilisasi pria/vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP)** didefinisikan sebagai suatu operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan. Operasi yang dimaksud adalah prosedur klinis untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan mengikat/memotong saluran sperma, sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses pembuahan dengan sel telur tidak terjadi. Vasektomi biasanya bersifat permanen.
5. **Intra Uterine Device (IUD)/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/spiral** didefinisikan sebagai alat KB dari bahan plastik atau tembaga, dipasang dalam rongga rahim untuk mencegah kehamilan.
6. **Suntikan** didefinisikan sebagai cara KB hormonal dengan cara menyuntikkan hormon progesteron dan atau estrogen. Suntikan diberikan pada masa interval 7 hari setelah haid, segera setelah persalinan atau keguguran atau kapan saja selama yakin tidak sedang hamil.
7. **Susuk KB/implan** didefinisikan sebagai alat KB berupa batang susuk, yang tipis dan halus seperti korek api, ditanam di bawah kulit lengan kiri (atau kanan jika kidal) bagian atas perempuan untuk mencegah kehamilan.
8. **Pil** didefinisikan sebagai alat KB berupa pil yang mengandung kombinasi progesteron dan estrogen untuk mencegah kehamilan.

9. **Kondom pria/karet KB** didefinisikan sebagai alat KB berupa kantong karet tipis dan elastis dipakai oleh pria ketika melakukan hubungan seksual untuk mencegah kehamilan. Kondom berfungsi sebagai penampung sperma agar tidak tumpah ke vagina, sehingga konsepsi tidak terjadi.
10. **Intravag** didefinisikan sebagai alat KB berupa tisu yang dimasukkan pada vagina ketika akan melakukan hubungan seksual.
11. **Diafragma** didefinisikan sebagai alat/cara KB yang berbentuk mangkok terbuat dari karet lunak yang dimasukkan ke dalam vagina untuk menutup mulut Rahim agar sperma tidak masuk ke dalam rahim dan bertemu dengan sel telur. Diafragma biasanya digunakan bersama *spermisida* (pembunuh sperma) berupa *jelly* atau krim yang berguna untuk menutup mulut rahim (*cervix*) sehingga menghalangi sperma bertemu sel telur.
12. **Kondom wanita** didefinisikan sebagai alat/cara KB berupa karet tipis berbentuk tabung yang ujungnya terdapat semacam spong dan dimasukkan ke dalam vagina.
13. **Metode menyusui alami/Amenorrhea Laktasi (MAL)** didefinisikan sebagai kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif (tanpa makanan dan minuman tambahan), belum haid, dan bayi berumur kurang dari 6 bulan.
14. **Pantang berkala/kalender** didasarkan pada pemikiran bahwa dengan tidak melakukan senggama pada hari-hari tertentu, yaitu pada masa subur dalam siklus bulanan maka dapat menghindarkan dari kehamilan.

5.2 Ulasan Singkat

Salah satu bentuk pembangunan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana (KB). Berbeda dengan masa lalu yang menekankan KB pada upaya menurunkan tingkat kelahiran yang masih tinggi pada saat itu, KB saat ini telah semakin berkembang dengan tujuan yang lebih luas yaitu untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab.

Kebijakan keluarga berencana menyangkut usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Kebijakan program keluarga berencana bertujuan untuk mengatur kehamilan yang diinginkan; menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak; meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi; meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; serta mempromosikan pemberian air susu ibu secara eksklusif sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Upaya yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan keluarga berencana adalah dengan meningkatkan keterpaduan dan peran serta masyarakat; pembinaan keluarga; dan pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Fertilitas merupakan salah satu komponen alamiah penentu laju pertumbuhan penduduk bersama dengan mortalitas dan menjadi indikator utama dalam upaya pengendalian penduduk. Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang wanita hanya mati satu kali tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi selama hidupnya. Di samping itu seseorang yang telah mati pada hari dan waktu tertentu tidak mempunyai risiko kematian yang kedua kali. Sebaliknya seorang wanita yang melahirkan seorang anak tidak berarti peluang melahirkan dari wanita tersebut berhenti. Kompleksnya pengukuran fertilitas juga disebabkan karena keterlibatan dua orang (suami dan istri). Masalah lain yang dijumpai dalam pengukuran fertilitas adalah tidak semua wanita mengalami risiko melahirkan karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak mendapat pasangan untuk berumah tangga, juga pada wanita yang bercerai atau menjanda.

Ada beragam faktor yang mempengaruhi dan menentukan fertilitas baik yang berupa faktor demografi maupun faktor non-demografi. Faktor demografi di antaranya adalah struktur umur, umur perkawinan, lama perkawinan, dan proporsi penduduk berstatus kawin. Sementara itu, faktor non-demografi di antaranya kondisi sosial dan ekonomi penduduk, kondisi psikologi, serta norma yang berlaku di masyarakat.

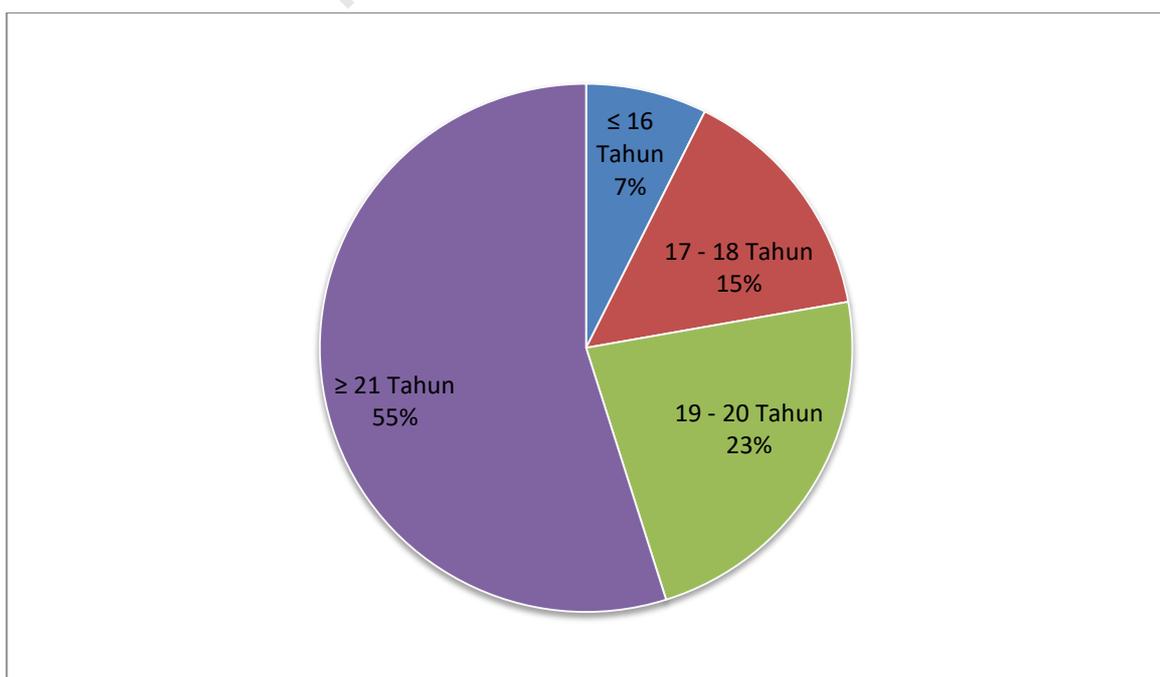
Bab ini akan menyajikan beberapa indikator fertilitas yang dihasilkan dari Susenas, antara lain umur perkawinan pertama, umur pada saat hamil pertama, jumlah anak yang dilahirkan hidup, jumlah anak yang masih hidup dan sudah meninggal, keluarga berencana dan lain-lain.

Umur perkawinan pertama seorang wanita mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama, semakin tinggi risiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anaknya. Hal ini karena pada umumnya wanita muda memiliki rahim yang belum cukup matang untuk proses berkembangnya janin, dan belum memiliki mental yang kuat untuk menghadapi masa kehamilan/melahirkan. Di sisi lain, semakin tinggi umur perkawinan pertama dari umur yang dianjurkan dalam program KB, juga semakin tinggi risiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

Tinggi rendahnya umur perkawinan pertama secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat fertilitas, semakin muda umur perkawinan pertama, maka semakin panjang masa produktif, sehingga berpeluang menaikkan tingkat kelahiran. Sebaliknya, semakin tua umur perkawinan pertama, maka semakin singkat masa produktif, sehingga berpeluang menurunkan tingkat kelahiran. Penundaan umur perkawinan pertama dapat menjadi salah satu upaya dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara menekan tingkat kelahiran. Kondisi ekonomi, sosial, dan budaya ikut menentukan tinggi rendahnya umur perkawinan pertama. Baik umur perkawinan pertama yang terlalu muda maupun terlalu tua dapat berakibat pada tingginya risiko kesehatan ibu dan anak, karena kondisi fisik ketika mengandung dan melahirkan sangat dipengaruhi oleh usia ibu. Usia ibu yang kurang ideal selain memberikan efek pada kesehatan ibu, juga dapat berimbas pada tingkat kesehatan anak yang dilahirkan. Umur perkawinan pertama yang dianjurkan adalah antara 20 hingga 30 tahun.

Gambar 5.1 menyajikan persentase perempuan berumur 10 tahun ke atas yang tercatat pernah kawin menurut umur saat perkawinan pertama di Maluku tahun 2019. Terlihat bahwa umur perkawinan pertama dari perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin ketika umurnya ≤ 16 tahun di Maluku cukup tinggi, yaitu sekitar 7 persen. Sebagian besar wanita usia subur yang pernah kawin di Maluku pertama kali kawin pada umur ≥ 21 tahun, yaitu sebesar 55 persen.

Gambar 5.1
Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2019



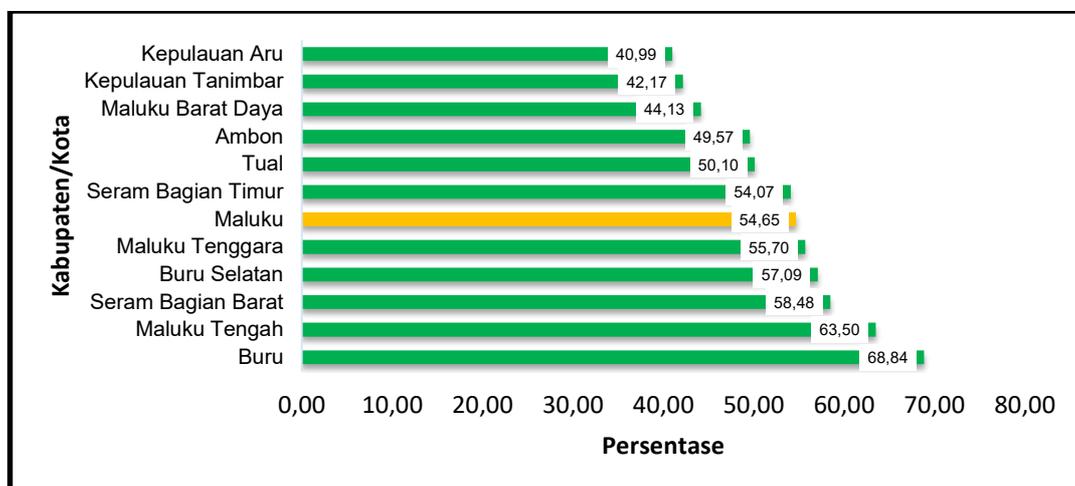
Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki persentase tertinggi (64,17 dan 62,94 persen) perempuan 10 tahun ke atas pernah kawin yang perkawinan pertamanya berumur \geq 21 tahun, disusul kemudian Kabupaten Maluku Tenggara (59,69 persen). Angka-angka tersebut dapat mengindikasikan tingkat pernikahan dini di tiga daerah tersebut rendah. Sementara itu, Kabupaten Buru memiliki persentase tertinggi (13,52 persen) perempuan 10 tahun ke atas pernah kawin yang perkawinan pertamanya berumur \leq 16 tahun dan persentase terendah tercatat di Kabupaten Maluku Barat Daya (3,81 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Pemerintah kembali menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) dengan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS). Umur 15—49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang umur tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang umurnya berada pada periode ini disebut wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur (PUS) bagi yang berstatus kawin.

Semakin banyak jumlah WUS, maka peluang banyaknya anak yang dilahirkan juga semakin besar. Semakin banyak jumlah anak berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya. Dengan demikian, pengendalian jumlah anak perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar wanita berumur 15—49 tahun pernah kawin di Maluku pernah/sedang menggunakan alat/cara KB sebesar 54,65 persen. Perbandingan antar kabupaten/kota untuk wanita pernah/sedang menggunakan alat/cara KB tersebut bervariasi. Persentase tertinggi tercatat di Kabupaten Buru sebesar 68,84 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 40,99 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Gambar 5.2
Persentase Perempuan Berumur 15 – 49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah/Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kabupaten/Kota, 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

Pada perempuan umur 15—49 tahun yang berstatus pernah kawin, sebesar 54,65 persen di antaranya tercatat sedang menggunakan/memakai alat/cara KB (Tabel 5.5). Dari perempuan umur 15—49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB, ternyata alat/cara KB suntikan dan susuk KB/Implant paling banyak dipilih, yaitu masing-masing tercatat sebesar 66,67 persen dan 13,82 persen. Sementara itu, penggunaan alat/cara kontrasepsi pil menempati urutan ketiga dengan persentase sebesar 10,27 persen, kemudian disusul oleh penggunaan alat/cara KB pantang berkala/kalender dengan persentase sebesar 4,57 persen, dan persentase penggunaan alat/cara KB selain yang telah disebutkan relatif kecil di bawah 1,50 persen. Pola penggunaan alat/cara KB pada kabupaten/kota di Maluku tercatat hampir sama. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 5.6.

<https://maluku.bps.go.id>

Tabel 5.1

Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Umur Perkawinan Pertama				Jumlah
	≤ 16	17 – 18	19 – 20	21 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	5,40	20,34	27,38	46,88	100,00
02 Maluku Tenggara	4,98	11,70	23,63	59,69	100,00
03 Maluku Tengah	5,29	12,82	25,93	55,95	100,00
04 Buru	13,52	23,79	26,81	35,87	100,00
05 Kepulauan Aru	9,98	15,90	18,59	55,52	100,00
06 Seram Bagian Barat	10,18	20,28	24,16	45,38	100,00
07 Seram Bagian Timur	11,03	15,74	22,89	50,34	100,00
08 Maluku Barat Daya	3,81	9,66	23,58	62,94	100,00
09 Buru Selatan	9,08	21,16	22,01	47,75	100,00
71 Kota Ambon	6,14	10,57	19,11	64,17	100,00
72 Kota Tual	7,96	16,76	19,21	56,07	100,00
Maluku	7,36	14,85	22,93	54,86	100,00

Tabel 5.2

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Tempat Melahirkan								Jumlah
	RS Pemerintah/ Swasta/RSIA	RS Bersalin/ Klinik	Puskesmas	Pustu	Praktik Nakes	Polindes/ Poskesdes	Rumah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kepulauan Tanimbar	27,64	0,28	15,69	4,14	0,00	0,78	50,73	0,74	100,00
02 Maluku Tenggara	40,71	1,42	12,37	0,00	0,00	1,55	43,94	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	17,86	0,00	2,07	0,00	1,95	0,00	78,12	0,00	100,00
04 Buru	5,36	7,46	6,82	3,74	0,58	4,32	71,72	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	24,00	0,57	2,02	0,00	0,00	0,49	72,93	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	10,18	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	73,71	4,09	100,00
07 Seram Bagian Timur	9,52	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	12,23	0,00	26,37	0,82	0,00	0,55	60,03	0,00	100,00
09 Buru Selatan	8,32	1,07	3,17	0,00	1,32	0,00	84,85	1,26	100,00
71 Kota Ambon	70,96	5,18	0,01	0,00	1,56	0,00	22,28	0,00	100,00
72 Kota Tual	41,18	4,32	4,97	0,00	0,00	0,00	49,53	0,00	100,00
Maluku	29,82	2,11	5,77	0,61	0,88	0,55	59,76	0,50	100,00

Tabel 5.3

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran yang Terakhir di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Penolong Proses Persalinan							Jumlah
	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat	Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun Beranak/ Paraji	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	9,06	2,08	61,73	0,00	27,13	0,00	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	23,43	0,76	48,52	1,35	25,40	0,54	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	12,89	0,00	50,05	2,07	35,00	0,00	0,00	100,00
04 Buru	3,43	0,00	70,87	0,00	25,29	0,41	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	7,30	2,80	40,44	0,49	48,96	0,00	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	7,82	1,09	49,63	0,00	39,14	2,32	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	6,79	0,00	29,02	0,00	64,18	0,00	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	5,62	3,69	42,41	0,00	47,74	0,53	0,00	100,00
09 Buru Selatan	5,87	0,00	29,21	0,74	60,92	3,26	0,00	100,00
71 Kota Ambon	45,42	0,00	45,99	1,83	5,31	0,00	1,44	100,00
72 Kota Tual	18,48	0,49	60,75	0,00	18,00	2,28	0,00	100,00
Maluku	17,91	0,67	48,77	1,00	30,79	0,56	0,31	100,00

Tabel 5.4

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun Pernah Melahirkan 2 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Berat Badan Bayi di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Ketika Dilahirkan				Jumlah
	< 2,5 Kg	≥ 2,5 Kg	Tidak Ditimbang	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	6,28	76,91	7,48	9,33	100,00
02 Maluku Tenggara	9,31	78,60	10,07	2,02	100,00
03 Maluku Tengah	8,87	74,67	14,85	1,61	100,00
04 Buru	19,09	55,96	19,63	5,31	100,00
05 Kepulauan Aru	18,63	58,17	10,50	12,70	100,00
06 Seram Bagian Barat	10,55	46,07	33,39	9,99	100,00
07 Seram Bagian Timur	15,20	30,63	39,54	14,64	100,00
08 Maluku Barat Daya	12,27	69,20	16,58	1,95	100,00
09 Buru Selatan	12,41	30,31	51,68	5,60	100,00
71 Kota Ambon	12,51	76,11	4,27	7,12	100,00
72 Kota Tual	11,45	76,01	12,54	0,00	100,00
Maluku	11,97	65,16	16,78	6,08	100,00

Tabel 5.5

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi KB di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Penggunaan Alat/Cara KB			Jumlah
	Ya, Pernah	Ya, Sedang	Tidak Pernah Menggunakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	10,72	31,99	57,30	100,00
02 Maluku Tenggara	15,92	39,78	44,30	100,00
03 Maluku Tengah	20,31	43,19	36,50	100,00
04 Buru	11,56	57,28	31,16	100,00
05 Kepulauan Aru	16,76	24,23	59,01	100,00
06 Seram Bagian Barat	14,06	44,42	41,52	100,00
07 Seram Bagian Timur	16,70	37,37	45,93	100,00
08 Maluku Barat Daya	16,65	27,48	55,87	100,00
09 Buru Selatan	17,29	39,80	42,91	100,00
71 Kota Ambon	19,11	30,46	50,43	100,00
72 Kota Tual	14,31	35,79	49,89	100,00
Maluku	16,88	37,77	45,36	100,00

Tabel 5.6

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Pernah Kawin yang Sedang ber KB Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Alat KB Digunakan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan									Jumlah
	Sterilisasi Wanita/Tubektomi/MOW	IUD/AKDR/Spiral	Suntikan	Susuk KB/ Implan	Pil	Kondom Pria/Karet KB	Metode Menyusui Alami	Pantang Berkala/ Kalender	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)
01 Kepulauan Tanimbar	1,46	2,96	66,22	19,62	6,72	0,00	0,00	3,02	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	1,98	1,67	42,67	35,13	6,62	0,00	3,83	8,11	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	0,78	2,45	72,96	10,43	7,35	0,00	0,00	6,03	0,00	100,00
04 Buru	0,49	0,86	67,45	20,19	9,49	0,38	0,00	0,82	0,32	100,00
05 Kepulauan Aru	0,00	1,76	63,71	13,20	14,46	0,00	5,90	0,00	0,98	100,00
06 Seram Bagian Barat	1,47	1,38	65,82	16,09	12,83	0,00	0,00	2,05	0,38	100,00
07 Seram Bagian Timur	1,67	0,00	79,88	5,08	6,41	0,00	1,85	1,01	4,09	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,45	0,00	77,48	3,89	8,69	0,00	0,00	6,93	2,55	100,00
09 Buru Selatan	0,00	2,05	69,37	2,52	16,26	0,00	4,57	4,70	0,54	100,00
71 Kota Ambon	2,25	1,84	60,67	11,50	13,81	0,00	0,00	8,08	1,85	100,00
72 Kota Tual	3,28	1,87	68,30	13,20	11,40	0,00	0,46	1,48	0,00	100,00
Maluku	1,33	1,70	66,67	13,82	10,27	0,05	0,73	4,57	0,87	100,00

BAB VI

PERUMAHAN

<http://maluku.bps.go.id>

6.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan berbagai konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Kepemilikan bangunan** didefinisikan sebagai status penguasaan bangunan tempat tinggal atau rumah yang ditempati. Kepemilikan bangunan dilihat dari sisi anggota rumah tangga yang mendiaminya. Status kepemilikan bangunan di antaranya:
 - a. **Milik sendiri**, jika bangunan tersebut betul-betul sudah milik kepala rumah tangga (krt) atau salah seorang anggota rumah tangga (art). Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.
 - b. **Kontrak**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.
 - c. **Sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
 - d. **Rumah dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu art, baik dengan membayar sewa maupun tidak.
 - e. **Bebas sewa milik orang lain**, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh art tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
 - f. **Rumah milik orang tua/sanak/saudara**, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.
 - g. **Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

2. **Luas lantai** didefinisikan sebagai luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah).
3. **Parket (parquetted)** didefinisikan sebagai menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai.
4. **MCK (Mandi, Cuci, Kakus) Komunal** didefinisikan sebagai salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
5. **Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)** didefinisikan sebagai sebuah struktur yang dirancang untuk membuang dan memisahkan limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan untuk keperluan lain. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.
6. **Air minum layak dan bersih** didefinisikan sebagai air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
7. **Perpipaan** didefinisikan sebagai bila air yang digunakan disalurkan menggunakan pipa dari sumber air sampai ke rumah.
8. **Hidran umum/terminal air** didefinisikan sebagai sarana penyediaan air bersih yang sumbernya berasal dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau distribusi yang bersifat komunal.

6.2 Ulasan Singkat

Selain sandang dan pangan, rumah (papan) merupakan kebutuhan utama manusia. Fungsi rumah saat ini tidak hanya dipandang sebagai tempat berlindung dari panas matahari maupun hujan saja tetapi telah meluas menjadi tempat tumbuh kembang sebuah keluarga. Oleh karena itu, rumah saat ini tidak hanya dipandang sebagai bangunan semata, tetapi juga diupayakan agar mendukung kesehatan dan kesejahteraan orang yang tinggal di dalamnya. Dari sanalah konsep rumah sehat, rumah layak anak, sanitasi sehat dan layak kemudian berkembang menjadi indikator yang harus dicapai.

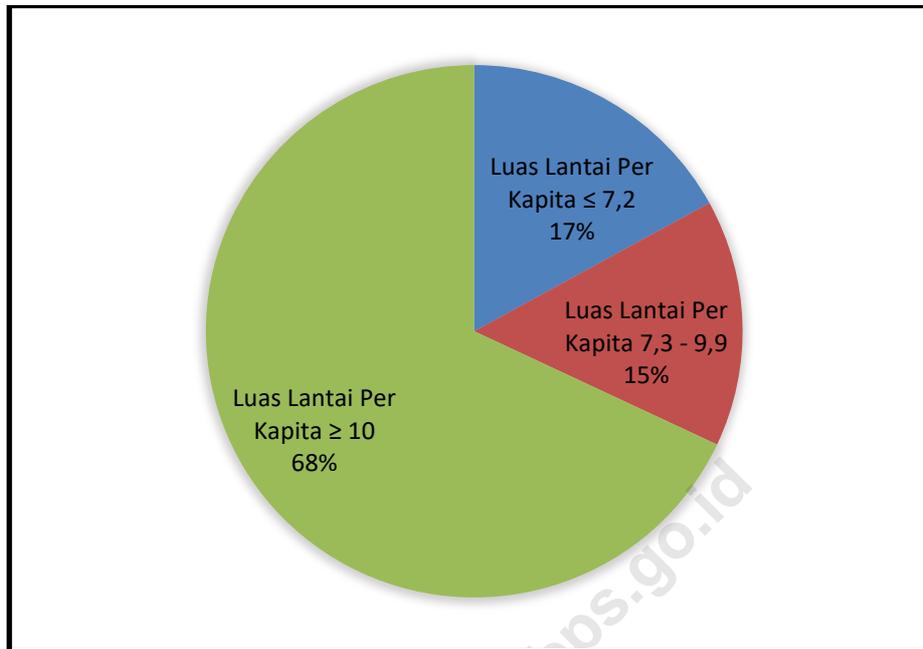
Bab ini akan menyajikan data terkait perumahan meliputi kepemilikan, kualitas bangunan (atap, lantai, dinding), tingkat kesejahteraan yang diproksi dengan luas lantai per kapita, sanitasi dan fasilitas buang air besar, sumber air, dan sebagainya.

Tabel 6.2 menyajikan persentase status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga di Maluku pada tahun 2019, tercatat sebesar 79,48 persen rumah tangga di Maluku sudah menempati bangunan tempat tinggal berstatus milik sendiri. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal menurut kabupaten/kota sangat bervariasi, Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki persentase tertinggi (90,78 persen) rumah tangganya dengan kepemilikan bangunan tempat tinggal berstatus milik sendiri, dan terendah (61,05 persen) di Kota Ambon. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Luas lantai rumah yang ditempati rumah tangga dapat dijadikan pendekatan untuk menilai kesejahteraan rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga di Maluku sudah menempati rumah dengan luas lantai $\geq 50 \text{ m}^2$ yaitu mencapai 62,68 persen. Ini berarti apabila ditinjau dari luas lantainya, lebih dari setengah rumah tangga di Maluku tercatat sudah menempati rumah yang memenuhi syarat standar rumah sehat (minimal 36 m^2). Fakta menarik terungkap dari hasil Susenas 2019, yaitu Kota Ambon tercatat sebagai kota dengan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan luas lantai $< 20 \text{ m}^2$ tertinggi di Maluku, yaitu 8,02 persen. Selain karena luas lahan yang terbatas, hal tersebut juga dapat disebabkan karena banyaknya rumah tangga yang tinggal di rumah sewa (indekos) dengan luas $< 20 \text{ m}^2$. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang mempunyai luas lantai minimum $7,2 \text{ m}^2$ per jiwa. Sekitar 17 persen rumah di Maluku mempunyai luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ per jiwa (Gambar 6.1). Persentase tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Aru (33,16 persen) dan terendah di Kota Tual (12,36 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.4. Luas bangunan tempat tinggal sehat semestinya cukup untuk penghuni di dalamnya atau disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan kepadatan penghuni (*overcrowded*). Salah satu dampak dari hunian *overcrowded* ini adalah mudahnya penularan penyakit antar penghuni rumah.

Gambar 6.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lantai Per Kapita (M²) di Provinsi Maluku, 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati juga dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menggambarkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Jenis atap yang digunakan merupakan salah satu faktor penentu baik buruknya kondisi dan kualitas rumah tempat tinggal.

Hasil Susenas 2019, menunjukkan sebagian besar rumah tangga di Maluku (87,71 persen) tercatat tinggal di rumah dengan atap seng. Selain menggunakan seng, juga ada sebagian rumah tangga di Maluku tercatat tinggal di rumah yang beratapkan jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia. Atap jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia banyak ditemukan di Kabupaten Kepulauan Aru. Di Kabupaten Kepulauan Aru persentase rumah tangga yang menggunakan jerami/ijuk/daun/rimba sebagai atap mencapai 14,30 persen (angka tertinggi di Maluku). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Jenis dinding memiliki peran utama dalam menentukan kuat tidaknya struktur bangunan rumah. Di samping itu dengan tujuan untuk memenuhi standar kesehatan, jenis dinding rumah yang dipilih sebaiknya dari bahan yang kedap air sehingga dinding terhindar dari basah dan lembab serta tidak berlumut. Hasil Susenas 2019 menunjukkan sebesar 78,63 persen rumah tangga Maluku tercatat tinggal di rumah dengan dinding dari tembok dan 21,37 persen yang tinggal di rumah yang bukan tembok seperti kayu, bambu dan lainnya. Bila dilihat menurut kabupaten/kota. Kabupaten Kepulauan Aru merupakan

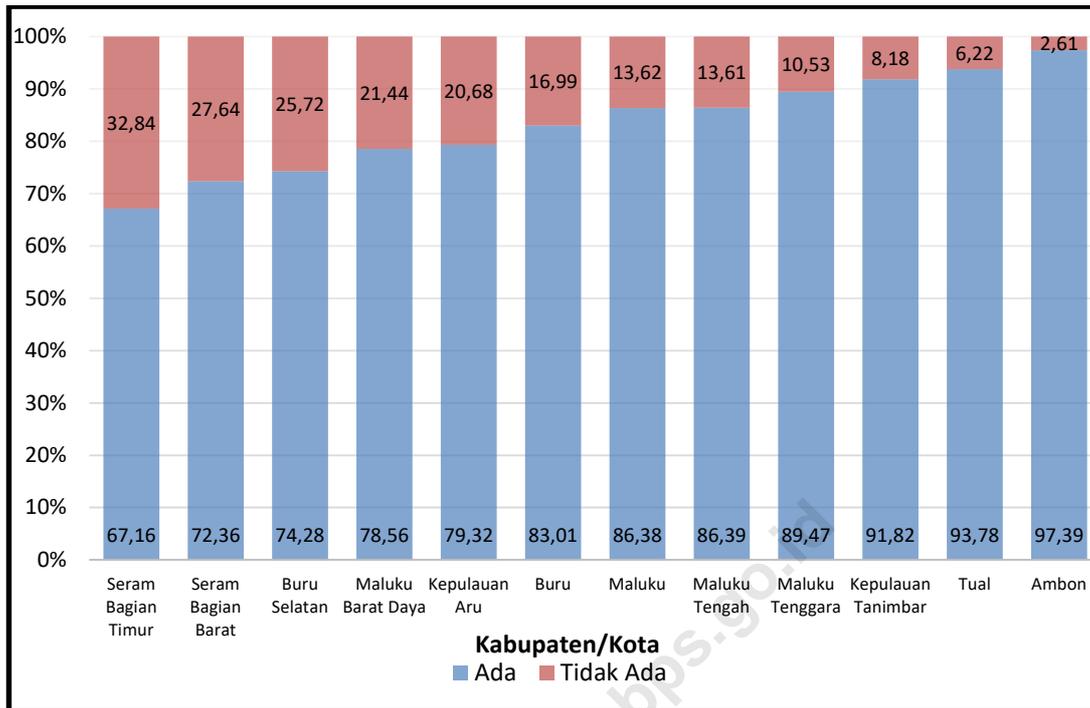
kabupaten dengan persentase terkecil rumah tangga yang tinggal di rumah berdinding tembok (49,97 persen).

Selain jenis atap dan dinding, jenis lantai juga dapat menjadi indikator penilaian rumah sehat. Ada bermacam-macam jenis lantai, di antaranya marmer/granit, keramik, parket, vinil, permadani, ubin, tegel, teraso, kayu, semen dan bata merah. Fungsi lantai secara umum sebagai alas pijakan kaki sehingga memberi kenyamanan ketika berjalan di atasnya. Di samping itu lantai juga dapat memberi nilai estetika suatu rumah atau bangunan. Lantai dari tanah dianggap kurang memenuhi standar kesehatan karena jika musim hujan akan menjadi lembab dan dapat menjadi media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti diare, cacingan, dan penyakit kulit. Begitu juga ketika musim panas, lantai tanah akan lebih banyak mengeluarkan debu, yang juga dapat menjadi media penyebaran penyakit. Sebagian besar rumah tangga di Maluku tercatat menempati rumah dengan jenis lantai utama terbuat dari keramik, ubin, tegel, teraso, semen, dan bata merah, yaitu sebesar 89,15 persen. Persentase rumah tinggal dengan jenis lantai dari tanah di Maluku 3,79 persen, bahkan di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon persentase rumah tinggal dengan jenis lantai dari tanah kurang dari 1 persen, tercatat masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,31 persen. Persentase tertinggi rumah tinggal dengan lantai tanah terdapat di Kabupaten Maluku Barat Daya (8,60 persen), disusul Kabupaten Buru (8,55 persen) dan Kabupaten Seram Bagian Barat (7,83 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.7.

Fasilitas rumah tidak hanya penting dari sisi kenyamanan penghuninya, namun tidak kalah penting adalah dari sisi kesehatan. Tiga fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuni akan dibahas pada bagian ini. Tiga fasilitas dasar tersebut adalah dan tempat buang air besar, sumber air minum/air bersih, sumber penerangan.

Salah satu sarana sanitasi penting dalam rumah adalah sarana pembuangan kotoran (jamban). Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999. Pada tahun 2019, persentase rumah tangga di Maluku yang tercatat telah tersedia fasilitas buang air besar mencapai 86,38 persen, baik merupakan fasilitas sendiri, bersama, maupun umum (lihat Tabel 6.8). Persentase rumah tangga yang belum memiliki jamban sebesar 13,62 persen rumah tangga.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Buang Air Besar, 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan daerah dengan persentase terendah (66,94 persen) yang rumah tangganya menggunakan fasilitas buang air besar. Sementara itu, Kota Ambon merupakan daerah dengan persentase tertinggi (97,18 persen), lihat Tabel 6.3.

Salah satu aspek penting dari fasilitas pembuangan air besar yang mempengaruhi baik buruknya sanitasi adalah jenis kloset. Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus yang dibedakan antara leher angsa, plengsengan, cemplung/cubluk dan tidak memakai kloset. Berdasarkan Tabel 6.9 diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan jamban leher angsa tercatat sebesar 92,30 persen, sedangkan penggunaan kloset selain leher angsa hanya sebesar 7,70 persen. Persentase penggunaan kloset leher angsa terendah (67,67 persen) tercatat di Kabupaten Kepulauan Aru, sementara itu tertinggi (99,23 persen) berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Air bersih adalah kebutuhan manusia yang paling dasar. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari tanpa makanan, tetapi akan mati tanpa minum. Air minum yang diminum pun harus bersih karena jika tidak, air dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti diare dan cacingan. Ketersediaan air bersih di rumah tangga diukur dari sumber air minum yang digunakan dan jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Sumber air minum mempengaruhi kualitas air minum. Untuk sumber air minum yang berasal dari sumber air minum layak, meliputi leding meteran, leding eceran, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dituntut memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Sementara itu, konsep air bersih meliputi air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Hal yang sama untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dituntut memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter.

Hasil Susenas 2019 menunjukkan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak tercatat sebesar 50,05 persen. Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan daerah yang persentase rumah tangganya menggunakan sumber air minum layak tertinggi, yaitu tercatat sebesar 68,17 persen dan 66,89 persen. Sementara itu, Kota Tual tercatat sebagai daerah dengan persentase paling rendah yaitu 33,92 persen.

Jarak sumber air minum (yang berasal dari pompa, sumur, atau mata air) ke tempat penampungan kotoran sangat mempengaruhi kualitas air minum, Jarak yang sehat antara sumber air minum dan tempat penampungan tinja disepakati minimal 10 meter, Di Maluku masih terdapat 22,63 persen rumah tangga yang jarak sumber air minumannya ke tempat penampungan kotoran/tinja kurang dari 10 meter. Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Buru merupakan daerah dengan persentase paling tinggi, yaitu sebesar 32,10 persen, disusul kemudian Kabupaten Buru Selatan sebesar 29,80 persen. Sementara itu, paling rendah tercatat di Kabupaten Seram Bagian Timur (11,47 persen) rumah tangga yang sumber air minumannya berjarak < 10 meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Sumber penerangan yang dicakup dalam publikasi ini adalah listrik dan bukan listrik. Listrik meliputi listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun non-PLN. Listrik merupakan sumber penerangan yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan jenis penerangan lainnya. Hal ini disebabkan listrik lebih praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibanding rumah tangga yang tidak menggunakan listrik. Berdasarkan Tabel 6.1 terlihat bahwa hampir seluruh rumah tangga di Maluku tercatat sudah menggunakan listrik, baik yang bersumber dari PLN maupun non-PLN, hanya 4,84 persen rumah tangga yang menggunakan penerangan nonlistrik. Apabila dirinci menurut kabupaten/kota, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon sudah lebih dari 90 persen rumah tangga tercatat menggunakan penerangan listrik PLN. Sementara itu Kabupaten Kepulauan Aru merupakan daerah

dengan persentase terendah (42,20 persen) yang rumah tangganya yang menggunakan penerangan listrik PLN. Data selengkapnya dapat dilihat di Tabel 6.15.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Rumah di Provinsi Maluku, 2019

Fasilitas Rumah (1)	Persentase (2)
Sumber Penerangan	
- Listrik (PLN dan non-PLN)	95,16
- Non-Listrik	4,84
Fasilitas Air Bersih	
- Sumber air minum	
• Bersih	73,17
• Layak	50,05
- Sumber air minum	
• Terlindung	89,86
• Tidak Terlindung	10,14
- Jarak pompa/sumur/mata air ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat	
• < 10 m	22,63
• ≥ 10 m	69,41
• Tidak tahu	7,95
Fasilitas buang air besar	
- Ada	86,38
- Tidak ada	13,62

Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

Sumber bahan bakar untuk memasak dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber bahan bakar terbarukan dan sumber bahan bakar tak terbarukan. Sumber bahan bakar terbarukan contohnya adalah kayu bakar, sedangkan sumber bahan bakar tak terbarukan adalah LPG dan minyak tanah. Sumber bahan bakar untuk memasak dari kayu dianggap sebagai bahan bakar yang tidak ramah lingkungan karena menyebabkan polusi dan merusak ekologi apabila digunakan secara terus menerus tanpa dilakukan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil Susenas 2019, lebih dari separuh (65,82 persen) rumah tangga di Maluku tercatat menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Sementara itu, rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak sebesar 32,55 persen. Apabila dicermati berdasarkan kabupaten/kota, persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk memasak adalah Kota Ambon, yaitu sebesar 95,01 persen dan persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar kayu adalah Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu sebesar 85,70 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.16.

Tabel 6.2

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal					Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	87,61	4,70	3,52	3,97	0,20	100,00
02 Maluku Tenggara	88,09	2,43	8,21	1,27	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	83,37	2,19	12,22	1,94	0,27	100,00
04 Buru	86,10	5,93	6,58	0,95	0,44	100,00
05 Kepulauan Aru	84,69	8,15	4,55	2,61	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	88,62	1,21	8,99	0,99	0,19	100,00
07 Seram Bagian Timur	90,78	4,59	4,05	0,58	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	90,16	0,38	7,35	2,11	0,00	100,00
09 Buru Selatan	90,27	3,98	4,85	0,89	0,00	100,00
71 Kota Ambon	61,05	14,56	14,99	9,40	0,00	100,00
72 Kota Tual	86,90	3,28	7,06	2,67	0,10	100,00
Maluku	79,48	6,50	10,01	3,88	0,13	100,00

Tabel 6.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Tempat Tinggal (m²) di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²)					Jumlah
	≤ 19	20 – 49	50 – 99	100 – 149	150 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	1,95	51,09	30,15	7,79	9,02	100,00
02 Maluku Tenggara	0,89	30,16	50,56	12,16	6,23	100,00
03 Maluku Tengah	2,23	28,81	49,18	14,20	5,58	100,00
04 Buru	1,75	36,13	44,91	11,51	5,70	100,00
05 Kepulauan Aru	5,50	54,67	32,57	5,29	1,95	100,00
06 Seram Bagian Barat	1,51	31,30	53,58	10,35	3,26	100,00
07 Seram Bagian Timur	1,99	30,01	51,66	13,08	3,26	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,67	37,88	50,53	8,73	2,18	100,00
09 Buru Selatan	2,66	34,86	49,20	10,99	2,29	100,00
71 Kota Ambon	8,02	32,61	37,57	13,53	8,27	100,00
72 Kota Tual	1,00	18,48	49,00	24,36	7,15	100,00
Maluku	3,71	33,61	44,34	12,49	5,85	100,00

Tabel 6.4

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Rumah per Kapita (m²) di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²)			Jumlah
	≤ 7,2	7,3—9,9	≥ 10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	26,89	19,25	53,87	100,00
02 Maluku Tenggara	13,08	17,52	69,40	100,00
03 Maluku Tengah	13,58	13,59	72,83	100,00
04 Buru	13,27	15,35	71,38	100,00
05 Kepulauan Aru	33,16	17,50	49,34	100,00
06 Seram Bagian Barat	13,59	16,44	69,97	100,00
07 Seram Bagian Timur	14,37	15,39	70,24	100,00
08 Maluku Barat Daya	16,29	19,26	64,46	100,00
09 Buru Selatan	18,19	19,32	62,49	100,00
71 Kota Ambon	17,63	14,32	68,06	100,00
72 Kota Tual	12,36	9,10	78,54	100,00
Maluku	16,67	15,28	68,05	100,00

Tabel 6.5
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas								Jumlah
	Beton	Genteng	Asbes	Seng	Bambu	Kayu/ Sirap	Jerami/ljuk/ Daun-Daunan/ Rumbia	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kepulauan Tanimbar	0,01	2,57	19,88	71,24	1,79	0,07	4,45	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	0,65	0,95	10,30	85,54	0,42	0,00	2,14	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	0,41	1,08	1,92	89,69	0,77	0,35	5,73	0,06	100,00
04 Buru	0,86	2,78	2,56	90,23	0,25	0,00	3,32	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	1,05	0,00	5,28	78,52	0,36	0,41	14,30	0,09	100,00
06 Seram Bagian Barat	1,85	0,44	2,95	85,08	1,53	0,18	7,45	0,51	100,00
07 Seram Bagian Timur	1,41	0,54	8,55	81,07	0,38	0,26	7,78	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,41	1,79	15,20	73,04	0,61	0,00	8,95	0,00	100,00
09 Buru Selatan	0,49	0,23	3,12	91,97	0,23	0,28	3,68	0,00	100,00
71 Kota Ambon	3,01	1,19	1,16	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 Kota Tual	2,05	0,67	6,99	88,44	0,91	0,00	0,94	0,00	100,00
Maluku	1,45	1,17	4,63	87,71	0,56	0,14	4,28	0,06	100,00

Tabel 6.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas							Jumlah
	Tembok	Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat	Kayu/Papan	Anyaman Bambu	Batang Kayu	Bambu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Kepulauan Tanimbar	86,66	1,10	9,70	0,90	0,00	0,53	1,12	100,00
02 Maluku Tenggara	91,09	0,88	6,85	0,02	0,00	0,00	1,15	100,00
03 Maluku Tengah	74,87	0,93	21,74	0,55	0,63	0,00	1,28	100,00
04 Buru	67,61	0,96	29,83	0,50	0,68	0,00	0,42	100,00
05 Kepulauan Aru	49,97	0,38	43,81	0,48	2,49	0,26	2,61	100,00
06 Seram Bagian Barat	66,63	0,50	28,09	0,86	0,94	0,17	2,81	100,00
07 Seram Bagian Timur	72,92	2,67	21,45	0,53	1,45	0,00	0,98	100,00
08 Maluku Barat Daya	88,67	1,06	2,83	1,22	0,11	5,15	0,96	100,00
09 Buru Selatan	82,23	0,50	15,95	0,00	0,40	0,22	0,71	100,00
71 Kota Ambon	88,13	0,70	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 Kota Tual	89,39	1,71	7,44	0,72	0,41	0,00	0,34	100,00
Maluku	78,63	0,93	18,26	0,42	0,53	0,27	0,96	100,00

Tabel 6.7
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas									Jumlah
	Marmer/ Granit	Keramik	Parket/ Vinil/Karpet	Ubin/Tegel /Teraso	Kayu/ Papan	Semen/ Bata Merah	Bambu	Tanah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01 Kepulauan Tanimbar	0,61	33,05	0,46	13,06	2,67	42,03	0,75	7,20	0,18	100,00
02 Maluku Tenggara	0,41	42,27	1,08	0,63	3,31	47,93	0,00	2,97	1,41	100,00
03 Maluku Tengah	0,83	33,17	0,13	18,17	1,63	41,78	0,21	4,09	0,00	100,00
04 Buru	0,97	23,88	0,59	8,93	3,64	53,12	0,19	8,55	0,15	100,00
05 Kepulauan Aru	0,27	16,80	0,00	11,38	43,12	28,14	0,00	0,13	0,17	100,00
06 Seram Bagian Barat	1,08	22,65	0,32	12,91	5,64	46,97	2,29	7,83	0,30	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,50	15,44	1,03	5,74	10,51	62,57	0,00	4,11	0,10	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,50	18,68	0,14	8,94	0,39	61,51	1,13	8,60	0,10	100,00
09 Buru Selatan	0,38	16,70	1,21	22,85	3,24	51,54	0,25	3,84	0,00	100,00
71 Kota Ambon	0,00	69,89	0,49	0,00	2,61	26,12	0,00	0,31	0,59	100,00
72 Kota Tual	0,81	51,38	2,62	4,00	3,41	34,87	0,00	2,92	0,00	100,00
Maluku	0,52	39,78	0,53	8,78	5,34	40,59	0,37	3,79	0,31	100,00

Tabel 6.8

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Fasilitas Tempat Buang Air Besar						Jumlah
	Ada, Digunakan Hanya ART Sendiri	Ada, Digunakan Bersama Rumah Tangga Tertentu	Ada, di MCK Komunal	Ada, di MCK Umum/ Siapapun Menggunakan	Ada, ART Tidak Menggunakan	Tidak Ada Fasilitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Kepulauan Tanimbar	80,65	3,63	0,00	7,50	0,04	8,18	100,00
02 Maluku Tenggara	75,72	3,46	0,46	9,63	0,19	10,53	100,00
03 Maluku Tengah	76,96	4,34	0,33	4,73	0,04	13,61	100,00
04 Buru	68,67	6,41	0,00	7,64	0,28	16,99	100,00
05 Kepulauan Aru	48,21	7,89	1,02	22,20	0,00	20,68	100,00
06 Seram Bagian Barat	58,82	7,97	0,28	5,00	0,29	27,64	100,00
07 Seram Bagian Timur	50,18	5,42	0,21	11,13	0,22	32,84	100,00
08 Maluku Barat Daya	60,65	6,15	5,17	6,43	0,16	21,44	100,00
09 Buru Selatan	54,95	6,02	0,00	13,08	0,23	25,72	100,00
71 Kota Ambon	79,62	14,15	0,00	3,41	0,21	2,61	100,00
72 Kota Tual	84,55	5,43	0,29	3,30	0,20	6,22	100,00
Maluku	71,28	7,91	0,40	6,62	0,17	13,62	100,00

Tabel 6.9

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri/Bersama Rumah Tangga Tertentu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset				Jumlah
	Leher Angsa	Plengsengan dengan Tutup	Plengsengan tanpa Tutup	Cemplung/ Cubluk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	99,23	0,66	0,00	0,11	100,00
02 Maluku Tenggara	97,83	1,12	0,38	0,67	100,00
03 Maluku Tengah	93,82	3,62	0,44	2,12	100,00
04 Buru	86,30	0,64	2,48	10,58	100,00
05 Kepulauan Aru	67,67	0,56	1,49	30,29	100,00
06 Seram Bagian Barat	97,81	0,72	1,47	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	82,01	1,98	5,49	10,52	100,00
08 Maluku Barat Daya	95,87	1,68	1,16	1,28	100,00
09 Buru Selatan	98,05	1,29	0,00	0,66	100,00
71 Kota Ambon	92,01	3,03	4,83	0,13	100,00
72 Kota Tual	96,78	0,38	0,98	1,86	100,00
Maluku	92,30	2,21	2,40	3,09	100,00

Tabel 6.10

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama yang Digunakan Minum											Jumlah
	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan (sungai, danau/ waduk, kolam, irigasi)	Air Hujan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01 Kepulauan Tanimbar	0,71	10,78	13,94	0,74	32,54	7,02	32,73	1,51	0,00	0,03	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	1,27	10,86	22,73	3,60	16,31	0,81	38,22	1,03	0,60	4,57	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	0,00	18,54	7,18	12,31	22,42	2,35	31,00	1,86	0,23	4,10	0,00	100,00
04 Buru	1,12	26,44	6,12	13,83	23,91	3,06	23,09	0,46	1,97	0,00	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	0,93	13,39	22,37	0,96	31,43	7,98	8,78	2,13	0,36	11,67	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,13	6,90	0,00	9,45	16,75	7,33	38,01	5,40	15,14	0,89	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,01	15,49	0,82	1,51	32,42	8,98	30,44	1,90	1,97	6,46	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,00	0,63	2,05	1,75	52,49	1,96	34,33	2,87	0,00	3,93	0,00	100,00
09 Buru Selatan	0,00	9,99	5,21	1,43	20,95	7,08	51,49	2,61	1,26	0,00	0,00	100,00
71 Kota Ambon	0,69	47,61	12,51	11,36	9,43	1,74	14,44	1,62	0,08	0,16	0,36	100,00
72 Kota Tual	0,74	49,61	5,97	19,93	10,35	0,81	7,63	3,47	0,00	1,48	0,00	100,00
Maluku	0,48	25,10	9,21	9,06	20,40	3,66	25,61	2,08	1,85	2,46	0,10	100,00

Tabel 6.11

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Dari Sumur Bor/Pompa/Sumur/Mata Air Terlindung/Tak Terlindung Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat			Jumlah
	< 10 M	≥ 10 M	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	19,70	70,46	9,84	100,00
02 Maluku Tenggara	26,54	71,22	2,24	100,00
03 Maluku Tengah	27,39	72,16	0,46	100,00
04 Buru	32,10	62,99	4,91	100,00
05 Kepulauan Aru	15,48	73,11	11,41	100,00
06 Seram Bagian Barat	26,31	62,87	10,82	100,00
07 Seram Bagian Timur	11,47	79,92	8,61	100,00
08 Maluku Barat Daya	18,65	66,27	15,08	100,00
09 Buru Selatan	29,80	60,60	9,59	100,00
71 Kota Ambon	15,12	70,36	14,52	100,00
72 Kota Tual	21,51	66,67	11,82	100,00
Maluku	22,63	69,41	7,95	100,00

Tabel 6.12

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama yang Digunakan Minum											Jumlah
	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan (sungai, danau/ waduk, kolam, irigasi)	Air Hujan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01 Kepulauan Tanimbar	0,00	1,56	18,79	1,17	35,09	18,66	22,70	1,34	0,70	0,00	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	0,00	0,00	27,06	4,63	16,66	5,07	39,37	0,73	0,69	5,79	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	0,00	0,45	8,18	18,27	28,69	4,73	27,99	2,93	6,57	2,10	0,07	100,00
04 Buru	0,00	0,00	16,38	21,81	32,86	3,29	21,69	0,52	2,81	0,00	0,65	100,00
05 Kepulauan Aru	0,17	0,00	31,55	2,10	27,10	13,58	8,82	2,95	1,93	11,80	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,00	0,00	0,00	13,27	19,87	10,25	33,93	3,86	18,81	0,00	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,00	0,00	0,00	7,54	38,75	20,86	22,35	5,16	4,15	1,20	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,00	0,00	2,05	2,03	51,91	2,96	33,97	2,17	0,35	4,56	0,00	100,00
09 Buru Selatan	0,00	0,13	5,42	5,68	25,55	9,48	44,15	2,46	7,11	0,00	0,00	100,00
71 Kota Ambon	0,00	0,00	22,46	41,29	12,50	2,47	18,17	1,68	1,27	0,16	0,00	100,00
72 Kota Tual	0,00	0,10	13,98	49,70	16,05	11,43	4,98	3,38	0,00	0,38	0,00	100,00
Maluku	0,01	0,19	14,28	21,45	24,31	7,07	24,16	2,37	4,41	1,68	0,07	100,00

Tabel 6.13

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll Dari Sumur Bor/Pompa/Sumur/Mata Air Terlindung/Tak Terlindung Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat			Jumlah
	< 10 M	≥ 10 M	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	24,34	67,32	8,34	100,00
02 Maluku Tenggara	25,29	71,00	3,70	100,00
03 Maluku Tengah	26,84	71,90	1,26	100,00
04 Buru	32,13	64,03	3,84	100,00
05 Kepulauan Aru	19,19	69,26	11,56	100,00
06 Seram Bagian Barat	26,09	63,71	10,20	100,00
07 Seram Bagian Timur	18,49	72,84	8,67	100,00
08 Maluku Barat Daya	18,98	66,06	14,96	100,00
09 Buru Selatan	32,01	59,62	8,37	100,00
71 Kota Ambon	21,57	69,51	8,93	100,00
72 Kota Tual	21,06	65,67	13,26	100,00
Maluku	24,31	68,56	7,13	100,00

Tabel 6.14
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih*)	Sumber Air Minum Layak**)
(1)	(2)	(3)
01 Kepulauan Tanimbar	72,22	60,76
02 Maluku Tenggara	75,73	68,17
03 Maluku Tengah	72,32	57,89
04 Buru	72,82	45,27
05 Kepulauan Aru	66,83	64,18
06 Seram Bagian Barat	48,62	42,47
07 Seram Bagian Timur	66,78	57,75
08 Maluku Barat Daya	63,60	66,89
09 Buru Selatan	61,79	51,80
71 Kota Ambon	85,73	37,59
72 Kota Tual	82,79	33,92
Maluku	73,17	50,05

*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung)

***) Terdiri dari air leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung)

Tabel 6.15

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama Rumah di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan Utama Rumah				Jumlah
	Listrik PLN dengan Meteran	Listrik PLN Tanpa Meteran	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01 Kepulauan Tanimbar	83,13	4,92	4,79	7,15	100,00
02 Maluku Tenggara	80,19	2,54	12,39	4,88	100,00
03 Maluku Tengah	93,92	4,52	0,00	1,57	100,00
04 Buru	86,19	5,88	4,07	3,85	100,00
05 Kepulauan Aru	37,11	5,09	32,79	25,02	100,00
06 Seram Bagian Barat	88,32	6,89	2,18	2,60	100,00
07 Seram Bagian Timur	74,02	3,67	8,20	14,11	100,00
08 Maluku Barat Daya	58,31	3,77	25,21	12,70	100,00
09 Buru Selatan	61,62	5,27	21,20	11,90	100,00
71 Kota Ambon	96,99	2,63	0,00	0,38	100,00
72 Kota Tual	84,66	3,73	7,70	3,92	100,00
Maluku	85,37	4,18	5,60	4,84	100,00

Tabel 6.16

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Bahan Bakar Utama untuk Memasak								Jumlah
	Tidak Memasak Di Rumah	Listrik	Elpiji 5,5 kg/ Bluegaz	Elpiji 12 Kg	Minyak Tanah	Arang	Kayu Bakar	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kepulauan Tanimbar	0,00	0,21	0,37	0,62	65,19	0,00	33,62	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	0,23	0,15	0,00	0,00	54,37	0,00	45,24	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	0,53	0,12	0,00	0,00	73,69	0,00	25,67	0,00	100,00
04 Buru	1,27	0,19	0,00	0,92	51,10	0,19	46,34	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,00	0,13	50,84	0,00	48,94	0,10	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,00	0,11	0,00	0,00	35,35	0,00	64,53	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,23	0,44	0,00	0,00	35,65	0,00	63,69	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,46	0,00	0,00	0,19	13,64	0,00	85,70	0,00	100,00
09 Buru Selatan	0,90	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	65,67	0,00	100,00
71 Kota Ambon	0,80	0,38	0,67	1,97	95,01	0,00	1,17	0,00	100,00
72 Kota Tual	0,00	0,00	0,00	0,08	80,83	0,00	19,09	0,00	100,00
Maluku	0,52	0,20	0,21	0,68	65,82	0,02	32,55	0,01	100,00

BAB VII
TEKNOLOGI DAN
KOMUNIKASI

7.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan berbagai konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Telepon seluler (HP)** didefinisikan sebagai perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon seluler modern biasanya mendukung layanan tambahan, seperti *Short Messages Services (SMS)*, *Multimedia Messages Service (MMS)*, *e-mail*, dan akses Internet, aplikasi bisnis dan permainan, serta fotografi. Saat ini, Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak seluler, yaitu *Global System for Mobile Telecommunications (GSM)* dan *Code Division Multiple Access (CDMA)*.
2. **Komputer** mengacu pada komputer desktop, laptop (*portable*), atau tablet (atau komputer genggam yang serupa).
 - **Personal Computer (PC)/Desktop** didefinisikan sebagai komputer yang biasanya tetap di satu tempat, biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang *keyboard*.
 - **Laptop (Portable)** adalah didefinisikan sebagai komputer yang cukup kecil untuk dibawa dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai komputer *desktop*, juga mencakup *notebook* dan *netbook* tetapi tidak termasuk *tablet* dan sejenisnya komputer genggam.
 - **Tablet (atau sejenisnya komputer genggam)** didefinisikan sebagai komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar, yang dioperasikan dengan menyentuh layar tanpa menggunakan *keyboard* fisik. Dalam hal ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar, dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utamanya, seperti *smartphone*. Tablet meskipun bisa digunakan untuk menelpon, tetapi tidak dimasukkan dalam kelompok telepon seluler karena fungsi utama tablet adalah sebagai computer.
3. **Internet** didefinisikan sebagai sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk *World Wide Web* dan *e-mail*, berita, hiburan dan *file data*.
4. **Telepon tetap nirkabel atau Fixed Wireless Access (FWA)** didefinisikan sebagai jaringan transmisi nirkabel lokal yang menggunakan teknologi seluler,

gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan sinyal kepada pelanggan di lokasi yang tetap ke sentral lokal. Lisensi FWA menggunakan teknologi CDMA (*Code Division Multiple Access*) yang mengikuti nomor telepon biasa dengan kode area tertentu yang tidak bisa dibawa ke luar area tersebut, kecuali dengan mengganti sementara dengan nomor kode area daerah setempat, Contoh: Flexy, StarOne dan Esia.

7.2 Ulasan Singkat

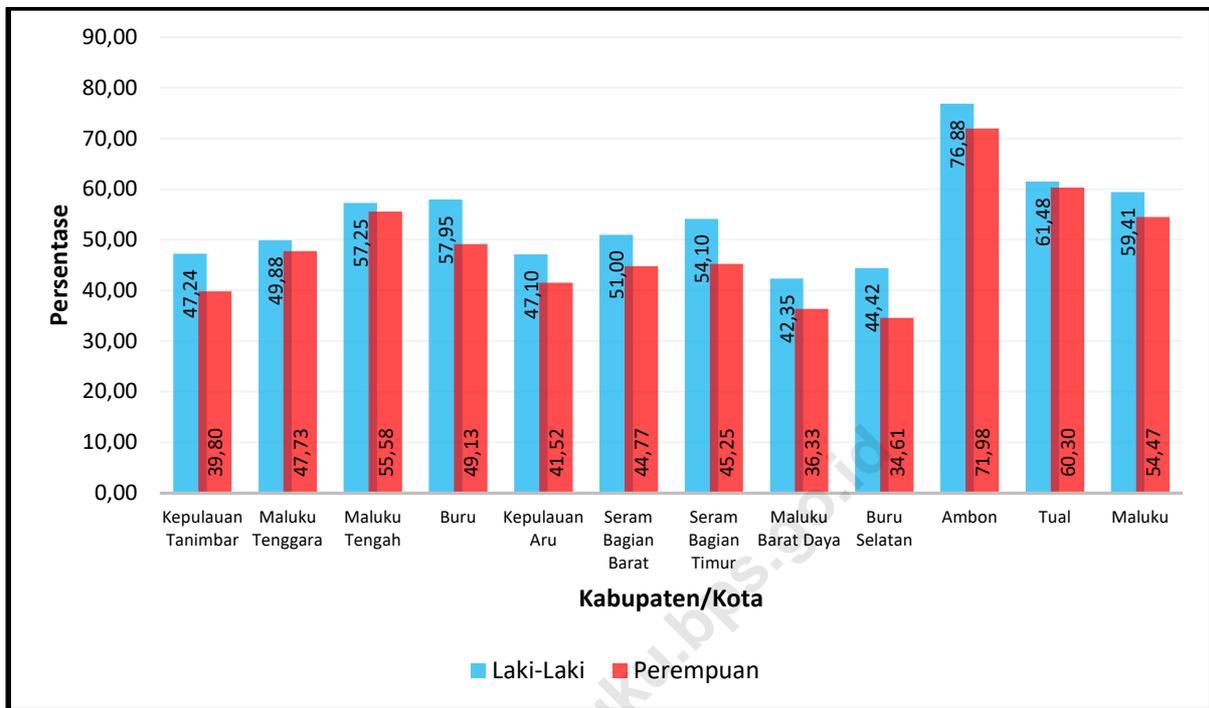
Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Lebih daripada sebelumnya, manusia kini lebih terhubung dengan sesamanya tanpa memandang jarak, ruang, dan waktu melalui teknologi. Dengan kemajuan teknologi saat ini kehidupan manusia dipermudah dan ditingkatkan kualitasnya.

Perkembangan teknologi dewasa ini khususnya internet dipercaya telah mendorong manusia untuk menambah pilihan-pilihan dalam hidupnya, membuka pasar yang lebih luas, membuka cakrawala ilmu pengetahuan yang seolah tak terbatas, dan kesempatan memperluas jaringan sosial. Kini penduduk tua dan muda, di desa dan di kota secara hampir merata sudah menikmati kemajuan teknologi ini.

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir dapat dicermati pada Tabel 7.1. Secara umum persentase penduduk laki-laki yang menggunakan telepon seluler tercatat sedikit lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Tercatat sebesar 72,02 persen penduduk laki-laki di Maluku menggunakan telepon seluler, sementara untuk penduduk perempuan tercatat sebesar 70,57 persen. Persentase penggunaan telepon seluler tertinggi di Kota Ambon yaitu tercatat sebesar 81,44 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Kepulauan Aru tercatat hanya sebesar 52,28 persen.

Apabila dilihat pada Gambar 7.1, persentase penduduk laki-laki yang memiliki/menguasai telepon seluler pada seluruh kabupaten/kota di Maluku tercatat lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Kota Ambon dan Kota Tual merupakan daerah dengan persentase tertinggi pertama dan kedua yang penduduknya memiliki/menguasai telepon seluler, baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Gambar 7.1
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

Pada Tabel 7.3, tercermin persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer. Komputer yang dimaksud disini termasuk *personal computer/PC, desktop, laptop, notebook*, dan tablet. Tercatat sebesar 13,78 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas di Maluku menggunakan komputer untuk mendukung aktivitasnya. Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang menggunakan komputer tercatat lebih tinggi (13,80 persen) dibandingkan penduduk perempuan (13,76 persen).

Pertukaran informasi maupun cara berkomunikasi melalui internet adalah cara baru sebagai lompatan teknologi yang menempatkan manusia berada pada tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan Tabel 7.4 dapat dilihat bahwa persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet tercatat sebesar 33,89 persen. Termasuk mengakses internet adalah penduduk yang mengakses *Facebook, Twitter, BlackBerry Messenger (BBM)*, dan *WhatsApp (WA)*. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, ada sedikit kesenjangan persentase penduduk umur 5 tahun ke atas yang mengakses internet, dimana persentase penduduk laki-laki tercatat lebih tinggi (34,21 persen) dibanding penduduk perempuan (33,56 persen). Secara umum, Kabupaten Maluku

Barat Daya tercatat memiliki persentase terendah (8,95 persen) penduduknya yang mengakses internet, sedangkan tertinggi ada di Kota Ambon (61,14 persen).

Public Switched Telephone Network (PSTN) yang merupakan jaringan telpon tetap dengan kabel sudah dianggap tidak efisien dan tidak fleksibel sehingga banyak ditinggalkan oleh penggunanya. Seperti terlihat pada Tabel 7.5, tercatat hanya sebesar 0,58 persen rumah tangga di Maluku memiliki/menguasai telepon rumah/(PSTN). Apabila dilihat menurut kabupaten/kota terlihat Kota Ambon tercatat mempunyai persentase tertinggi (1,42 persen) rumah tangganya memiliki/menguasai telepon rumah. Disusul kemudian Kota Tual (0,77 persen) dan Kabupaten Maluku Tenggara (0,71 persen). Pada Tabel 7.5, juga dapat dicermati persentase rumah tangga yang memiliki komputer/laptop. Tercatat sebesar 18,32 persen rumah tangga di Maluku memiliki komputer/laptop, Kota Ambon dan Kota Tual tercatat memiliki persentase tertinggi, yaitu sebesar 35,39 persen dan 20,24 persen, sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan dengan persentase terendah yang sama, yaitu tercatat sebesar 7,05 persen.

Tabel 7.1

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	61,14	59,14	60,14
02 Maluku Tenggara	65,97	66,89	66,44
03 Maluku Tengah	75,77	75,71	75,74
04 Buru	68,40	64,80	66,64
05 Kepulauan Aru	54,86	49,52	52,28
06 Seram Bagian Barat	67,24	67,33	67,28
07 Seram Bagian Timur	67,66	63,32	65,53
08 Maluku Barat Daya	57,86	55,91	56,89
09 Buru Selatan	63,64	60,57	62,15
71 Kota Ambon	82,36	80,51	81,44
72 Kota Tual	77,08	78,68	77,89
Maluku	72,02	70,57	71,30

Tabel 7.2

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	47,24	39,80	43,52
02 Maluku Tenggara	49,88	47,73	48,78
03 Maluku Tengah	57,25	55,58	56,42
04 Buru	57,95	49,13	53,65
05 Kepulauan Aru	47,10	41,52	44,40
06 Seram Bagian Barat	51,00	44,77	47,97
07 Seram Bagian Timur	54,10	45,25	49,76
08 Maluku Barat Daya	42,35	36,33	39,34
09 Buru Selatan	44,42	34,61	39,63
71 Kota Ambon	76,88	71,98	74,45
72 Kota Tual	61,48	60,30	60,88
Maluku	59,41	54,47	56,96

Tabel 7.3

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Dekstop/Laptop/Notebook/Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	8,83	7,49	8,16
02 Maluku Tenggara	8,42	8,48	8,45
03 Maluku Tengah	9,88	11,56	10,71
04 Buru	9,08	8,87	8,97
05 Kepulauan Aru	6,52	8,24	7,35
06 Seram Bagian Barat	6,29	5,73	6,02
07 Seram Bagian Timur	5,43	3,55	4,51
08 Maluku Barat Daya	5,21	6,27	5,74
09 Buru Selatan	5,05	3,62	4,35
71 Kota Ambon	28,84	27,92	28,39
72 Kota Tual	13,74	13,35	13,54
Maluku	13,80	13,76	13,78

Tabel 7.4

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	16,36	14,10	15,24
02 Maluku Tenggara	23,06	20,14	21,56
03 Maluku Tengah	30,89	31,82	31,35
04 Buru	27,87	28,44	28,15
05 Kepulauan Aru	17,21	17,15	17,18
06 Seram Bagian Barat	22,80	20,97	21,91
07 Seram Bagian Timur	16,10	14,80	15,46
08 Maluku Barat Daya	9,58	8,31	8,95
09 Buru Selatan	16,88	12,37	14,68
71 Kota Ambon	61,52	60,76	61,14
72 Kota Tual	39,44	39,28	39,36
Maluku	34,21	33,56	33,89

Tabel 7.5

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah (PSTN), Komputer/Laptop Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Telepon Rumah (PSTN)	Komputer/Laptop
(1)	(2)	(3)
01 Kepulauan Tanimbar	0,20	15,13
02 Maluku Tenggara	0,71	13,93
03 Maluku Tengah	0,25	12,94
04 Buru	0,19	11,08
05 Kepulauan Aru	0,17	12,93
06 Seram Bagian Barat	0,29	8,84
07 Seram Bagian Timur	0,00	7,05
08 Maluku Barat Daya	0,00	6,77
09 Buru Selatan	0,24	7,05
71 Kota Ambon	1,42	35,39
72 Kota Tual	0,77	20,24
Maluku	0,58	18,32

BAB VIII
KEADAAN SOSIAL
EKONOMI RUMAH
TANGGA LAINNYA

8.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan berbagai konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Beras murah/raskin** didefinisikan sebagai program bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin berupa pendistribusian beras khusus kepada keluarga miskin yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah.
2. **Kartu Indonesia Pintar (KIP)** didefinisikan sebagai kartu yang diberikan oleh Pemerintah sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak memperoleh bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
3. **Program Indonesia Pintar (PIP)** didefinisikan sebagai bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan langsung kepada siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. **Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)** didefinisikan sebagai kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013.
5. **Korban Kejahatan** didefinisikan sebagai seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau mengalami tindak kejahatan atau usaha/percobaan usaha kejahatan.

8.2 Ulasan Singkat

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Pada tahun 2019, 1,19 persen penduduk di Provinsi Maluku pernah menjadi korban kejahatan. Korban kejahatan lebih tinggi dirasakan oleh laki-laki daripada perempuan, dengan perbandingan 1,46 persen untuk laki-laki dan 0,85 persen untuk perempuan.

Salah satu butir Nawa Cita adalah mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program perlindungan sosial telah diluncurkan oleh pemerintah, di antaranya Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia

Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras Sejahtera/Rastra (sebelumnya disebut Beras Untuk Rakyat Miskin/Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain.

Susenas Maret 2019 mencatat beberapa informasi sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan monitoring kebijakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program perlindungan. Informasi tersebut di antaranya mengenai pembelian/penerimaan beras miskin, penerimaan kredit usaha, penerimaan Bantuan Siswa Miskin, kepemilikan aset, kepemilikan/penerimaan jaminan sosial, dan penerimaan kartu perlindungan sosial.

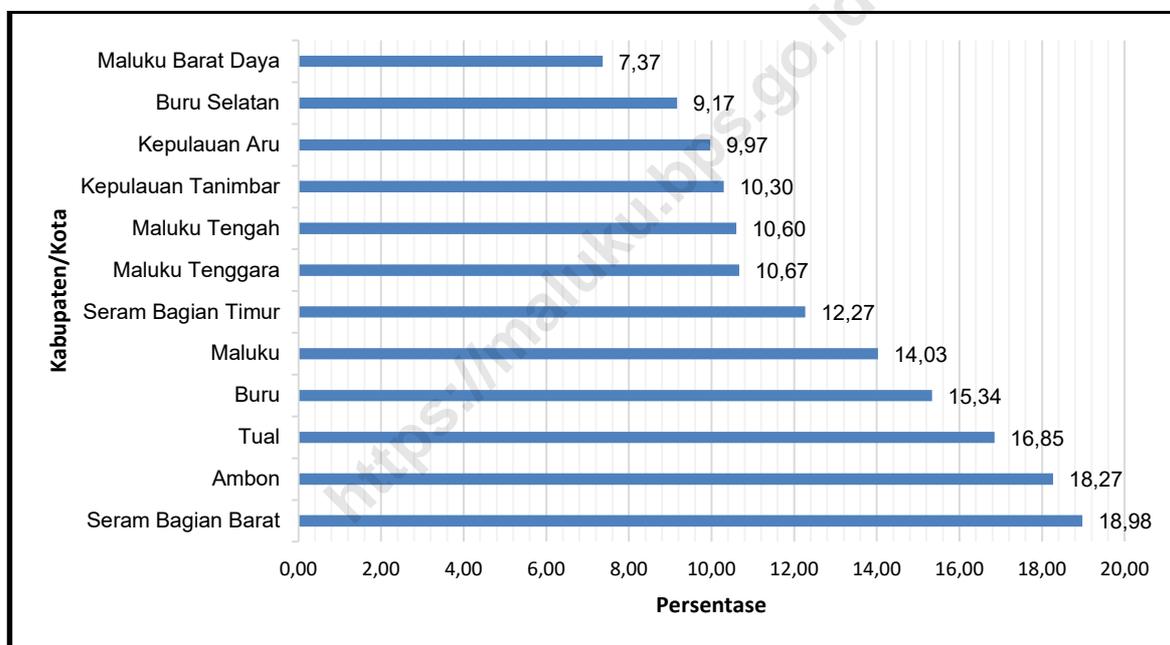
Program Beras Sejahtera (Rastra) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Program ini dijalankan pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, Rastra bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Penerima manfaat menebus raskin dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga beras di pasaran, yaitu sebesar Rp1.600,00,- per kilogram karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan pengentasan penduduk miskin, program raskin juga berguna untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Tabel 8.2 menunjukkan bahwa sebesar 27,49 persen rumah tangga di Maluku tercatat membeli/mendapatkan raskin. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki persentase tertinggi (67,08 persen) rumah tangganya membeli/mendapatkan raskin. Disusul kemudian Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan persentase berturut-turut tercatat sebesar 46,13 persen dan 45,63 persen. Kota Ambon memiliki persentase terendah, tercatat sebesar 5,92 persen. Apabila dicermati jumlah kilogram pembelian/penerimaan raskin, tercatat sebesar 27,83 persen rumah tangga di Maluku membeli raskin dengan jumlah < 15 kg selama 3 bulan terakhir, dan tercatat sebesar 28,71 persen membeli raskin dengan jumlah 15-29 kg. Sementara itu tercatat sebesar 28,43 persen rumah tangga di Maluku membeli raskin dengan jumlah 30-45 kg. Pola jumlah pembelian raskin hampir mirip pada masing-masing kabupaten/kota di Maluku kecuali Kabupaten Buru Selatan yang membeli/mendapatkan raskin > 45 kg selama 3 bulan terakhir tercatat persentasenya paling besar, yaitu 59,57 persen.

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah mencanangkan program pemberian kredit usaha yang ditujukan kepada masyarakat ekonomi rendah dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian kredit tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan modal usaha skala kecil.

Gambar 8.1 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga di Maluku yang tercatat menerima kredit usaha selama setahun terakhir adalah sebesar 14,03 persen. Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki persentase terbesar, yaitu sekitar 18,98 persen rumah tangganya menerima kredit usaha selama setahun terakhir, disusul kemudian Kota Ambon (18,27 persen) dan Kota Tual (16,85 persen). Ada beberapa macam kredit usaha yang diterima oleh rumah tangga di Maluku, jenis kredit usaha yang berasal dari Bank Umum selain Kredit Usaha Rakyat menempati persentase terbesar, tercatat sebesar 41,32 persen. Disusul kemudian jenis Kredit Usaha Rakyat (28,64 persen) dan koperasi (9,81 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.4.

Gambar 8.1
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2019



Sumber: Susenas Maret 2019, diolah.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 yang merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag), PIP adalah program nasional yang dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah hingga anak lulus Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandarisasi). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus

sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Hasil Susenas Maret 2019 menunjukkan sebesar 9,54 persen rumah tangga di Maluku tercatat menerima PIP. Dari total rumah tangga yang menerima PIP tercatat sebesar 64,74 persen rumah tangga menerima PIP SD sederajat, sebesar 37,96 persen menerima PIP SMP sederajat dan sebesar 21,30 persen rumah tangga menerima PIP Sekolah Menengah sederajat. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.5.

Jaminan sosial jaminan sosial (*Social Security*) secara luas didefinisikan sebagai sistem perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan. Jaminan sosial yang dicakup dalam Susenas Maret 2019, antara lain jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara umum, persentase rumah tangga di Maluku yang tercatat memiliki atau menerima jaminan sosial setahun terakhir relatif masih rendah. Persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan pensiun/veteran sebesar 9,78 persen, sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon PHK berturut-turut sebesar 6,34 persen, 5,83 persen, 5,66 persen, dan 1,53 persen. Data selengkapnya menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 8.6.

Pada Tabel 8.6, dapat dilihat persentase rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu tercatat sebesar 14,87 persen. Persentase rumah tangga yang menerima kartu dan dapat menunjukkan kartu tercatat sebesar 10,25 persen, sedangkan yang tidak dapat menunjukkan kartu sebesar 4,62 persen.

Kepemilikan aset merupakan indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, semakin banyak aset yang dimiliki oleh rumah tangga menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Di Maluku, secara umum hasil Susenas Maret 2019 menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki aset tanah/lahan tercatat sebesar 63,80 persen, rumah tangga memiliki aset lemari es/kulkas sebesar 47,84 persen, rumah tangga memiliki aset sepeda motor tercatat sebesar 46,13 persen, rumah tangga memiliki aset emas perhiasan (minimal 10 gram) sebesar 13,88 persen, rumah tangga memiliki aset televisi layar datar (minimal 30 inci) sebesar 12,18 persen, rumah tangga memiliki aset perahu sebesar 8,34 persen, rumah tangga memiliki aset AC tercatat sebesar 7,85 persen dan rumah tangga memiliki aset perahu motor tercatat sebesar 4,63 persen. Sementara itu,

kepemilikan asset mobil, tabung gas 5,5 kg atau lebih besar, dan pemanas air, hanya sebesar < 3,5 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.8.

<https://maluku.bps.go.id>

Tabel 8.1

Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Pernah Menjadi Korban Kejahatan		
	Laki—Laki	Perempuan	Laki—Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kepulauan Tanimbar	1,23	0,74	0,99
02 Maluku Tenggara	0,71	0,91	0,81
03 Maluku Tengah	0,92	0,93	0,92
04 Buru	2,73	0,85	1,81
05 Kepulauan Aru	0,93	0,44	0,69
06 Seram Bagian Barat	0,63	0,77	0,70
07 Seram Bagian Timur	1,27	0,38	0,84
08 Maluku Barat Daya	1,53	0,53	1,03
09 Buru Selatan	0,83	1,22	1,02
71 Kota Ambon	2,31	1,14	1,73
72 Kota Tual	0,99	0,18	0,58
Maluku	1,46	0,85	1,16

Tabel 8.2

Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin (Raskin) Selama 4 Bulan Terakhir (November 2019 – Februari 2019) Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Beras yang Dibeli di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	% Rumah Tangga yang Membeli/ Mendapatkan Beras Raskin	Jumlah Beras yang Dibeli (Kg)				Jumlah
		< 15	15 – 29	30 – 45	> 45	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kepulauan Tanimbar	33,47	29,28	17,58	21,45	31,69	100,00
02 Maluku Tenggara	20,70	26,85	31,05	38,88	3,22	100,00
03 Maluku Tengah	33,13	46,31	21,49	30,34	1,86	100,00
04 Buru	33,10	5,75	12,42	24,75	57,08	100,00
05 Kepulauan Aru	46,13	21,94	43,80	23,17	11,08	100,00
06 Seram Bagian Barat	45,63	32,09	23,77	40,77	3,37	100,00
07 Seram Bagian Timur	45,61	31,12	19,78	25,50	23,60	100,00
08 Maluku Barat Daya	67,08	14,94	64,66	10,89	9,51	100,00
09 Buru Selatan	15,46	7,17	12,42	20,84	59,57	100,00
71 Kota Ambon	5,92	6,16	53,51	31,69	8,64	100,00
72 Kota Tual	12,58	14,89	25,85	52,19	7,07	100,00
Maluku	27,49	27,83	28,71	28,43	15,03	100,00

Tabel 8.3
Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli/Menerima Raskin Menurut Kabupaten/Kota dan Harga Raskin yang Dibeli/Diterima (Rp) di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Harga Raskin yang Dibayarkan			Total
	< 1600	1600	> 1600	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	50,23	13,77	36,00	100,00
02 Maluku Tenggara	23,43	2,71	73,86	100,00
03 Maluku Tengah	77,12	22,11	0,77	100,00
04 Buru	0,00	0,00	100,00	100,00
05 Kepulauan Aru	29,29	61,71	9,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	62,72	10,37	26,91	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,00	0,00	100,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	77,20	4,05	18,75	100,00
09 Buru Selatan	30,96	0,00	69,04	100,00
71 Kota Ambon	7,39	23,54	69,07	100,00
72 Kota Tual	63,99	15,18	20,82	100,00
Maluku	55,21	16,27	28,53	100,00

Tabel 8.4

Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kredit Usaha di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	% Rumah Tangga yang Ada yang Ada Anggota Rumah Tangganya Menerima Kredit Usaha	Jenis Kredit Usaha									
		Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Bank Umum Selain KUR	Bank Perkreditan Rakyat	Koperasi	Perorangan dengan Bunga	Pegadaian	Perusahaan Leasing	Kelompok Usaha Bersama (KUBE/ KUB)	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01 Kepulauan Tanimbar	10,30	16,13	45,93	22,11	2,95	0,00	3,88	4,19	0,98	0,00	3,89
02 Maluku Tenggara	10,67	37,36	40,90	13,13	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
03 Maluku Tengah	10,60	43,69	33,67	8,15	15,91	3,74	0,00	0,00	0,64	0,00	4,84
04 Buru	15,34	40,69	43,72	3,33	2,77	2,22	0,00	4,18	0,00	0,00	3,60
05 Kepulauan Aru	9,97	19,85	55,17	2,15	10,87	1,58	14,43	0,00	0,00	0,00	8,84
06 Seram Bagian Barat	18,98	31,46	32,16	11,11	18,18	2,37	1,98	0,99	0,00	0,77	0,98
07 Seram Bagian Timur	12,27	41,38	28,31	11,77	0,00	3,55	0,00	4,44	0,00	0,00	12,66
08 Maluku Barat Daya	7,37	44,76	23,00	21,40	0,00	1,41	0,00	3,21	0,00	0,00	6,21
09 Buru Selatan	9,17	49,75	32,38	13,70	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
71 Kota Ambon	18,27	12,81	49,34	8,71	10,09	4,27	4,79	11,69	0,96	0,00	1,85
72 Kota Tual	16,85	48,99	37,51	1,36	4,53	0,51	1,81	0,00	4,76	0,00	1,76
Maluku	14,03	28,64	41,32	9,13	9,81	3,00	2,76	5,23	0,70	0,10	3,44

Tabel 8.5

Persentase Rumah Tangga Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis PIP yang Diterima di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Persentase Ruta yang ada Anggota Rutanya Menerima PIP	Jenis Program Indonesia Pintar		
		PIP SD Sederajat	PIP SMP Sederajat	PIP SMA Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	8,46	68,16	30,13	14,94
02 Maluku Tenggara	7,88	62,29	44,66	24,46
03 Maluku Tengah	12,21	71,58	40,15	15,75
04 Buru	9,03	71,25	23,16	35,33
05 Kepulauan Aru	6,54	80,93	20,77	12,92
06 Seram Bagian Barat	13,20	63,39	37,91	22,87
07 Seram Bagian Timur	8,44	60,57	38,29	20,20
08 Maluku Barat Daya	8,32	76,77	33,31	21,91
09 Buru Selatan	11,10	59,90	48,80	24,93
71 Kota Ambon	8,13	54,35	41,11	22,34
72 Kota Tual	6,72	49,48	48,30	35,08
Maluku	9,54	64,74	37,96	21,30

Tabel 8.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Sosial yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jaminan Sosial yang Dimiliki				
	Pensiun/Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan	Jaminan/Asuransi	Pesangon PHK
			Kerja	Kematian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kepulauan Tanimbar	10,25	5,61	5,46	5,23	3,05
02 Maluku Tenggara	16,20	12,55	12,35	14,32	3,92
03 Maluku Tengah	13,25	9,80	9,69	8,99	2,37
04 Buru	7,87	5,12	2,45	2,50	0,16
05 Kepulauan Aru	6,52	6,20	5,60	4,98	1,72
06 Seram Bagian Barat	10,40	7,99	7,43	8,05	3,22
07 Seram Bagian Timur	2,14	0,70	0,69	0,86	0,70
08 Maluku Barat Daya	5,39	2,85	1,69	2,80	0,48
09 Buru Selatan	9,23	8,32	8,41	7,81	0,24
71 Kota Ambon	7,96	3,05	2,39	1,85	0,37
72 Kota Tual	18,84	13,71	15,56	14,65	1,81
Maluku	9,78	6,34	5,83	5,66	1,53

Tabel 8.7

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Menerima Kartu Keluarga Sejahtera			Total
	Ya, Dapat Menunjukkan Kartu	Ya, Tidak Dapat Menunjukkan Kartu	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Tanimbar	8,06	2,80	89,14	100,00
02 Maluku Tenggara	14,29	7,79	77,92	100,00
03 Maluku Tengah	10,53	3,81	85,66	100,00
04 Buru	8,90	6,81	84,30	100,00
05 Kepulauan Aru	6,86	5,35	87,79	100,00
06 Seram Bagian Barat	18,73	6,79	74,49	100,00
07 Seram Bagian Timur	10,96	1,61	87,43	100,00
08 Maluku Barat Daya	26,77	5,37	67,86	100,00
09 Buru Selatan	13,60	4,30	82,09	100,00
71 Kota Ambon	4,72	3,73	91,55	100,00
72 Kota Tual	13,09	7,39	79,52	100,00
Maluku	10,25	4,62	85,14	100,00

Tabel 8.8

Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Aset Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kepemilikan Aset di Provinsi Maluku, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Aset yang Dimiliki										
	Tabung Gas 5,5 Kg Atau Lebih	Lemari Es/ Kulkas	AC	Pemanas Air	Emas/ Perhiasan (Minimal 10 Gram)	Sepeda Motor	Perahu	Perahu Motor	Mobil	Telivisi Layar Datar (Minimal 30 Inch)	Tanah/ Lahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01 Kepulauan Tanimbar	0,98	31,13	7,97	2,57	6,56	39,33	11,19	6,69	2,66	9,48	87,88
02 Maluku Tenggara	0,65	35,22	4,07	1,93	6,69	28,83	12,32	5,63	1,24	5,34	66,87
03 Maluku Tengah	0,24	56,42	4,84	1,03	10,45	45,71	8,23	3,99	4,13	10,29	73,96
04 Buru	1,18	41,38	3,70	0,48	11,35	59,77	2,94	2,50	5,09	6,60	78,21
05 Kepulauan Aru	0,39	20,18	5,11	4,10	8,86	23,66	23,10	9,53	1,90	8,18	37,48
06 Seram Bagian Barat	0,37	31,30	2,44	3,25	8,85	34,04	8,43	6,60	3,04	5,19	72,59
07 Seram Bagian Timur	0,00	21,56	0,77	0,41	9,77	29,95	20,64	10,05	0,76	5,36	75,34
08 Maluku Barat Daya	0,39	15,50	1,83	0,63	1,66	31,83	5,55	6,40	0,62	4,50	26,76
09 Buru Selatan	0,00	25,54	0,39	0,90	6,85	39,91	12,70	11,50	1,17	3,76	65,13
71 Kota Ambon	3,27	71,05	17,33	4,45	26,04	60,50	2,66	1,50	7,08	23,69	49,88
72 Kota Tual	0,73	58,10	10,34	2,13	14,56	53,48	12,05	3,52	4,60	12,65	69,10
Maluku	1,25	47,84	7,85	2,42	13,88	46,13	8,34	4,63	4,16	12,18	63,80